

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

(STUDI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PRODUKSI
OPAKDI DESA JAMBANGAN KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN
MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

UUN MEISA BEKTI

115030101111076



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN S1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

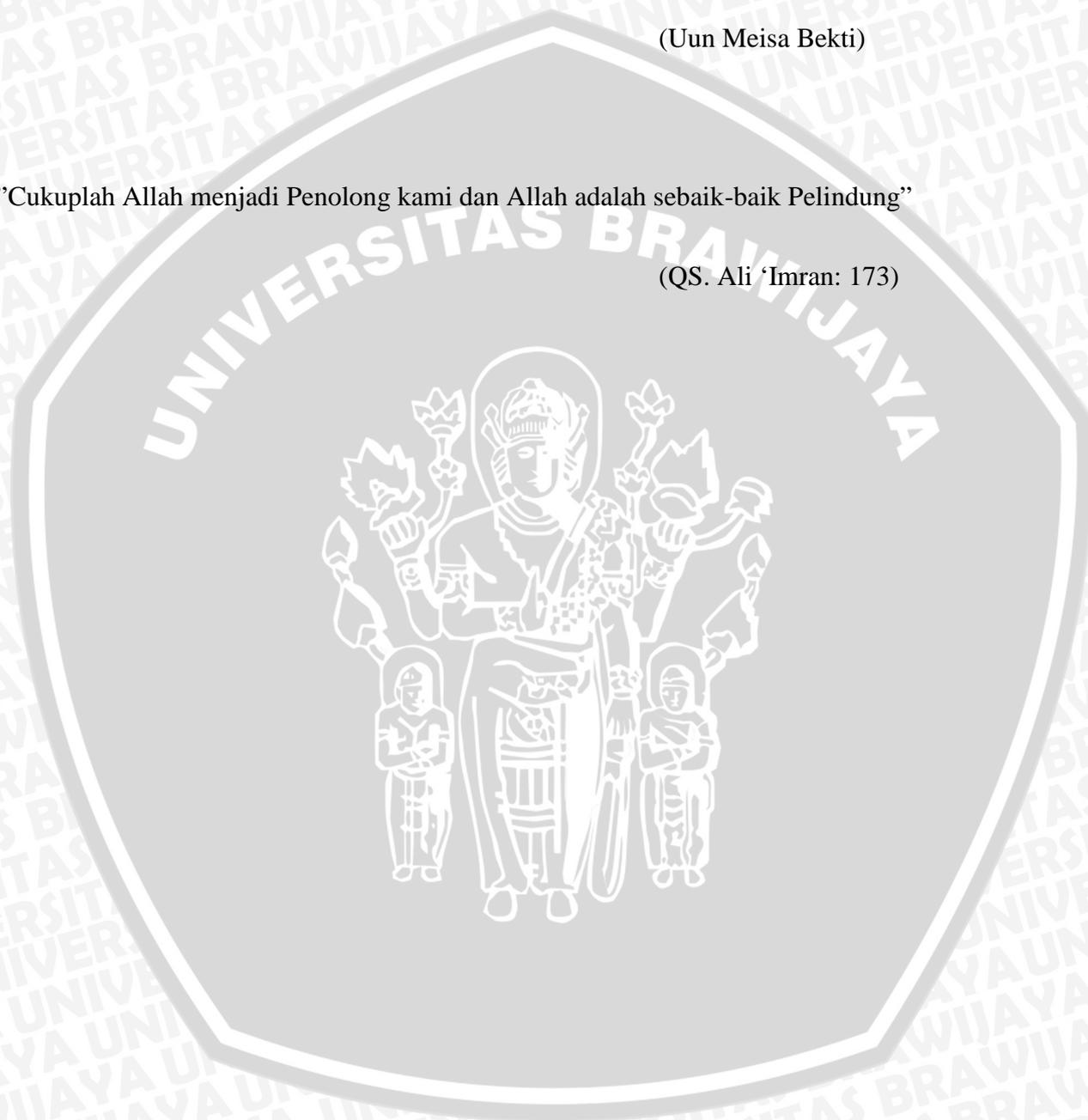
MOTTO

Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna bagi orang lain

(Uun Meisa Bekti)

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung"

(QS. Ali 'Imran: 173)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karyaku ini, kepada:

Kedua Orang Tuaku, Bapak Slamet Sutomo dan Ibu Siti Mariyam

Atas doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan,

Atas kasih sayangnya selama ini yang begitu tulus dan besar,

Atas pengorbanan yang diberikan dengan begitu hebatnya merawat dan mendidik dengan cinta kasihnya sehingga bisa menjadi seperti ini,

Atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini,

Kakak-kakakku Tersayang Eko Wahyudi, Selasih Kusumawati, S.Kom, dan Robby Sumariyanto yang telah memberikan dukungan, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini,

Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini,

Special Someone, Moch Iqbal Jawahir atas kasih sayang, perhatian, doa dan dukungan yang diberikan serta telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

Sahabat-sahabatku tercinta,

Khususnya Windhy teman mulai maba yang selalu ada dalam suka dan duka dan mengajarkan pentingnya kebersamaan,

Dinda, Dita, Omeng, Wulan, Osa atas dukungan, kepedulian dan perhatian selama ini

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 6 Desember 2015



Uun Meisa Bkti
NIM. 115030101111076



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opakdi Desa Jambangan
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Uun Meisa Bekti

NIM : 115030101111076

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 7 Januari 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Riyanto M. Hum

NIP. 19600430 198601 1 001

Drs. Romula Adiono, M.AP

NIP. 19620401 198703 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Januari 2016

Skripsi atas nama : Uun Meisa Bekti

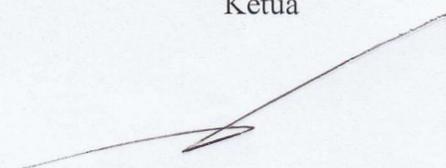
Judul : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa
Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)

Malang, 26 Januari 2016

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



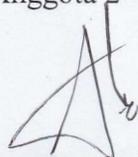
Dr. Riyanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota 1



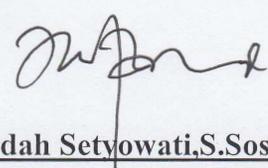
Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

Anggota 2



Alfi Haris Wanto, M.AP, MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota 3



Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si
NIP. 19710505 199903 2 001

RINGKASAN

Uun Meisa Bekti, 2011, **Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**, Pembimbing Utama Dr. Riyanto, M.Hum, Pendamping Drs. Romulo Adiono, M.AP

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat, melalui Dinas Koperasi dan UMKM salah satunya dengan pemberdayaan Industri Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam strategi pemberdayaan opak.

Penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik, Pembangunan, Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis dari Milles Hubberman.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membahas fokus penelitian tentang strategi pemberdayaan UMKM produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang meliputi (1) melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian diharapkan mampu untuk menumbuhkan iklim usaha pada industri opak di Desa Jambangan, (2) mengembangkan hasil produksi agar dapat berkembang pesat dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya, (3) dengan pembiayaan dan penjaminan dari pemerintah diharapkan mampu membantu pengusaha opak dalam mendapatkan tambahan modal, dan (4) adanya kemitraan diharapkan dapat membantu memasarkan hasil produksi opak namun saat ini Kabupaten Malang masih menggunakan sistem konsinyasi. Yang menjadi faktor pendukung yaitu lokasi yang strategis dan bahan baku mudah di dapat, sedangkan faktor penghambat adalah rendahnya kualitas SDM, kurangnya modal usaha, dan kesulitan dalam pemasaran.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) perlu melakukan pendampingan secara terus menerus untuk memfasilitasi UMKM yang belum mempunyai SIUP dan melakukan pendampingan dalam pengajuan proposal bagi UMKM yang ingin mendapatkan pembinaan dan pelatihan. Perlu adanya kerja sama antara Usaha Mikro, Kecil Menengah dengan Usaha Besar. Serta perlunya melibatkan stakeholder lainnya dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

SUMMARY

Uun Meisa Bekti, 2011, The Strategy of Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) (Studies on Micro, Small and Medium Production Opaque Jambangan Village District Dampit Malang Districts), The Main Supervisor Dr. Riyanto, M.Hum, Companion Drs. Romulo Adiono, M.AP

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to be the center of attention for a large contribution to economic growth. One of the efforts of Malang Regency Government in addressing social problems in the community , through the Department of Cooperatives and SMEs one with empowerment Industry Peel Village Jambangan Dampit District of Malang . The purpose of this study is to describe and analyze the strategy of empowerment of SMEs Production of Peel Village Jambangan Dampit District of Malang . Supporting factors and obstacles encountered in opaque empowerment strategy .

This study uses the theory of Public Administration , Development , Empowerment Strategy Cooperatives and SMEs , and Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) . In this research use descriptive research with a qualitative approach . Data collection techniques by researchers that through observation , interviews , and documentation . While data analysis is the method of analysis of Milles Hubberman .

Based on this research, the author discusses the research focus of the strategy of empowerment of SMEs production of opaque Village Jambangan District of Dampit Malang include (1) through the Departmen of Cooperative, SMEs and Industry expected to be able to grow the business climate in the industry opaque in the village Jambangan, (2) the development of result production in order to thrive and compete with other products, (3) with financing and guarantees from the government is expected to help entrepreneurs opaque to obtain additional capital, (4) the parthnership is expected to help market the production of opaque but when Malang still using the consignment system. Supporting factors, namely its strategic location and easy raw material in the can, while the limiting factor is the poor quality of Human Resources (HR), the lack of venture capital, and difficulties in marketing.

Some suggestions that can convey the author of , among others : the Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) need to conduct continuous assistance to facilitate SMEs who do not have SIUP and guidance on submission of proposals for SMEs that want to get coaching and training . The need for cooperation between the Micro, Small and Medium to Large Enterprises . As well as the need to involve other stakeholders in the empowerment of SMEs in Malang .

Keywords: *Strategy, Empowerment, Micro, Small dan Medium Enterprises (SMEs)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Lely Indahmindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Riyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, semangat, dan dukungan dalam proses penulisan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Romulo Adiono, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, semangat dan dukungan serta kemudahan bagi kelancaran dalam proses penulisan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
6. Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi dalam proses belajar mengajar selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha dan para Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu dalam proses perijinan penelitian.
8. Bapak Sukowiyono, SH, MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
9. Seluruh Kepala Bagian beserta Pegawai Dinas Kopeasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
10. Semua informan yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan serta waktu dalam pengambilan data penelitian ini sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 11.

12. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta, yang telah sabar dalam membimbing, memberikan semangat dan inspirasi, memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya dalam penulisan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
13. Kakak-kakakku Tersayang yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan penulisan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
14. Special Someone, Moch Iqbal Jawahir yang telah banyak memberikan semangat, doa dan mampu menjadi inspirasi.
15. Sahabat-sahabat tercinta dari semua kalangan yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan doanya hingga penyusunan skripsi ini selesai.
16. Seluruh teman-teman FIA Publik 2011 yang telah banyak membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	16
1. Pengertian Administrasi Publik	16
2. Konsep Administrasi Publik	17
3. Fungsi Administrasi Publik	19
B. Pembangunan	19
C. Pemberdayaan Masyarakat	23
1. Konsep Arti dan Prinsip	23
D. Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.....	33
1. Penumbuhan Iklim Usaha	33
2. Pengembangan Usaha	35
3. Pembiayaan dan Penjaminan.....	35
4. Kemitraan	36
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Instrumen Penelitian	50
G. Metode Analisis	51



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum	54
1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Malang	54
2. Desa Jambangan	57
3. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	61
B. Penyajian Data	90
1. Strategi Pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	90
a. Penumbuhan Iklim Usaha	90
a) Aspek Pendanaan	90
b) Aspek Sarana dan Prasarana	93
c) Aspek Informasi Usaha	96
d) Aspek Kemitraan	97
e) Aspek Perizinan Usaha	99
f) Aspek Promosi Dagang	101
b. Pengembangan Usaha	101
a) Bidang Produksi dan Pengolahan	101
b) Bidang Pemasaran	106
c. Pembiayaan dan Penjaminan	108
d. Kemitraan	111
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	113
a. Faktor Pendukung	115
b. Faktor Penghambat	115
C. Pembahasan	123
1. Strategi Pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	124
a. Penumbuhan Iklim Usaha	124
a) Aspek Pendanaan	125
b) Aspek Sarana dan Prasarana	126
c) Aspek Informasi Usaha	127
d) Aspek Kemitraan	128
e) Aspek Perizinan Usaha	129
f) Aspek Promosi Dagang	129
b. Pengembangan Usaha	130
a) Bidang Produksi dan Pengolahan	131
b) Bidang Pemasaran	133
c. Pembiayaan dan Penjaminan	134
d. Kemitraan	135
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang	137
a. Faktor Pendukung	137
b. Faktor Penghambat	138

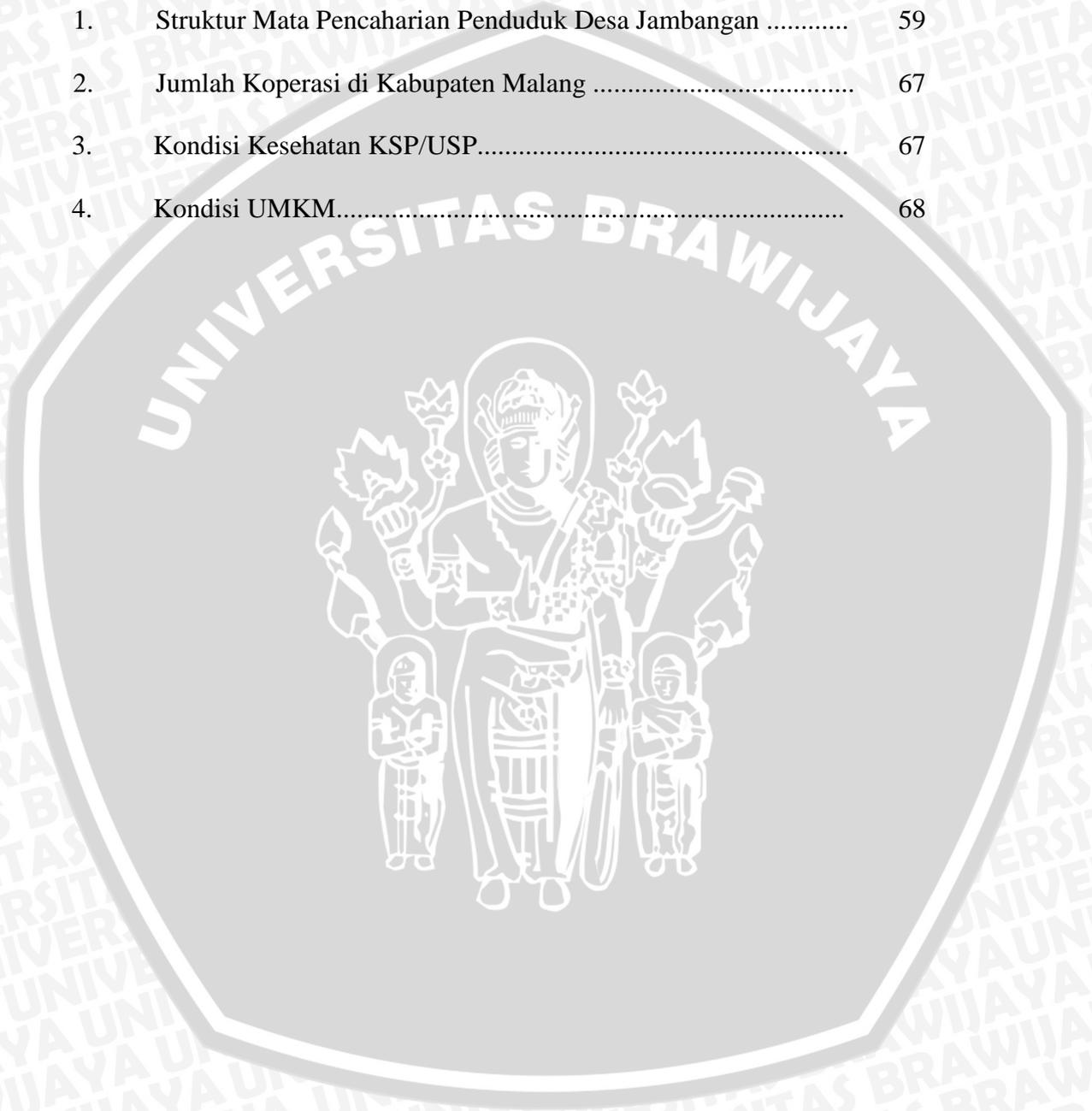
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran	145
Daftar Pustaka	147
Lampiran	



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Jambangan	59
2.	Jumlah Koperasi di Kabupaten Malang	67
3.	Kondisi Kesehatan KSP/USP.....	67
4.	Kondisi UMKM.....	68



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat	32
2.	Komponen dalam Analisis Data	53
3.	Peta Kabupaten Malang	54
4.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Malang	89
5.	Macam-macam bentuk opak yang sudah jadi	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintah di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari segi-segi politik, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi pemerintah dalam pembangunan erat kaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya secara merata dalam bidang spiritual maupun materil berdasarkan nilai-nilai pancasila. Seiring dengan kemajuan zaman menjadikan perlunya upaya-upaya dalam melakukan transformasi struktur sosial, ekonomi, politik, sehingga kebijakan dinilai menjadi bagian terpenting dari pembangunan dalam pengurangan jumlah masyarakat miskin yang ada di suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, fasilitas dan dana sedangkan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang berupa prakarsa maupun swadaya gotong royong pada setiap pembangunan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaloh (2007:72) yang menyatakan bahwa "pemerintah daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang bersinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Tim Deliveri (2004) yang dikutip dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:76) yang menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin”.

Melihat pentingnya peran pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mampu membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sumodoningrat (2004) dalam Mardikanto dan Soebianto (2012:32) menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar memiliki modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Mengacu pada hal tersebut dalam menentukan arah pembangunan, dan secara praktis menunjuk pada upaya-upaya memberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang notabene pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan permodalan dan penguatan pasar.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah yang mana terdapat pada pasal 14 Undang-undang No.32 tahun 2004 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

“Kabupaten atau kota memiliki urusan yang memfasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya untuk penanggulangan sosial. Kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersangkutan dan mendorong perkembangan wilayah baik materil maupun spiritual.”

Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara langsung untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah, serta untuk menghadapi tantangan perkembangan global diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai sektor, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk perubahan iklim dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum dalam pasal 5 Undang-undang No 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

2. Menumbuh dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Labih Lanjut Tambunan (2012:1) menyatakan bahwa :

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar”.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM sering menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang dalam permodalan dana lemah di bidang pemasaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Irianto (1996:165) yang menyatakan bahwa “apa yang dihadapi oleh pengusaha kecil, bersifat sangat kompleks. Jika dirumuskan, permasalahan mereka tidak

menyangkut empat hal, yaitu masalah permodalan, masalah produksi, masalah Sumber Daya Manusia dan masalah akses pemasaran”.

Peran serta Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah diperlukan agar UMKM dapat berkembang lebih pesat. Pembinaan itu ditujukan agar sektor ini dapat berperan sebagai sumber penghasilan yang cukup bagi pemilik usaha dan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengolahannya. Karena jika dalam hal tersebut dapat ditangani dengan baik, UMKM dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial. Oleh karena itu inilah sektor UMKM perlu ditangani dan dibina secara lebih serius oleh pemerintah daerah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Namun demikian, ada sejumlah persoalan umum yang dihadapi UKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.

Pemerintah perlu membuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi beroperasinya UKM. Untuk itu maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prawirokusumo (1999) mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemberdayaan UKM: (a) kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan distorsi pasar, (b) kebijakan ekonomi yang memberi peluang UKM dapat mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, dan (c) kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan. Selanjutnya dukungan penguatan yang meliputi: peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM; peningkatan penguasaan teknologi; peningkatan penguasaan informasi; peningkatan penguasaan permodalan; peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi dan manajemen; pencadangan tempat usaha ; dan pencadangan bidang-bidang usaha.

Terkait dengan hal tersebut, maka upaya untuk menurunkan kemiskinan Pemprov Jatim menerapkan lima strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi itu yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha makro dan kecil, penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr Soekarwo saat memberikan kuliah dalam rangka launching Program magister kajian kemiskinan dengan tema “Membedah pemikiran Pak Dhe Karwo dalam mengatasi masalah kemiskinan, “Senin (25/3) di Universitas Brawijaya Malang. Penanganan kemiskinan harus dilakukan dalam meningkatkan kepedulian (*awareness*) dengan cara meletakkan hati dan perasaan cintanya terhadap

masyarakat miskin. “Yang terpenting bagaimana orang yang tidak mampu, diurus dan diajak berbicara serta harus ada intervensi program dari negara. Program tersebut antara lain salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),”ujarnya. “Melihat kondisi tersebut, diharapkan bahwa orang miskin jangan diharuskan untuk berfikir bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan, tapi bagaimana kita meletakkan pemikiran tentang dirinya sendiri dan melibatkan untuk mengambil keputusan,” imbuhnya. (<http://www.jatimprov.go.id>)

Sehubungan dengan itu, salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar dan wilayah terluas di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang. Luas wilayah Kabupaten Malang sendiri adalah sebesar 3.534,86 Km² dan dengan jumlah penduduk sejumlah 2.419.822 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Selain itu Kabupaten Malang merupakan salah satu barometer perekonomian di Jawa Timur, hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Malang yang menduduki peringkat 6 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Cukup tingginya aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini konsisten secara positif dengan program pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini dapat bermuara pada keberhasilan atau kegagalan.

Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana amanat

Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Malang berupaya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkaitan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi Bantuan Tunai Langsung) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau 3,97%; miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin 68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, melalui Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pelaku ekonomi.

Berdasarkan Perencanaan Strategis untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai khususnya dalam mengelola potensi daerah maka banyak potensi yang dapat dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat diantaranya sektor UMKM. Salah satunya pemberdayaan Industri Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Wilayah Desa Jambangan merupakan sentra industri kecil makanan tradisional opak di Kabupaten Malang. Sampai saat ini dengan adanya industri kecil opak di daerah tersebut belum banyak menampakkan perkembangan yang sangat pesat. Dalam mengembangkan usahanya masih memiliki beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha opak di Desa Jambangan yang menyebabkan hasil produksinya kurang maksimal antara lain masalah pengelolaan manajemen yang kurang profesional, di Desa Jambangan kebanyakan dari pengusaha tersebut hanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang tergolong masih rendah.

Selanjutnya yang selama ini menjadi kendala dalam produksi opak di Desa Jambangan itu sendiri adalah dari masing-masing pengrajin opak masih belum bisa mengembangkan usahanya. Dalam hal ini produksi opak yang selama ini dijalankan

belum adanya inisiatif untuk menciptakan berbagai macam rasa dan model dari opak itu sendiri. Selain itu masalah pengolahan, dimana produksi opak yang selama ini dijalankan masih belum memiliki label. Disamping itu pengetahuan akan kelengkapan usaha masih minim dimiliki oleh para pengrajin opak. Masih banyak pengusaha opak di Desa Jambangan yang belum memiliki ijin usaha perdagangan, karena beberapa pengusaha opak biasa langsung menjual kepedagang pengepul dan kepengusaha yang lebih besar, sehingga aspek perijinan sering kali diabaikan oleh beberapa pengusaha opak di Desa Jambangan. Dimana dalam mendapatkan akses permodalan, pembinaan dan pelatihan serta bantuan akses pemasaran, aspek legalitas yaitu memiliki ijin usaha perdagangan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengusaha opak di Desa Jambangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM Industri Opak di Desa Jambangan sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan iklim usaha yang produktif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemberian kesempatan kerja, pengembangan usaha seluas-luasnya dan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka dalam pengembangan industri kecil yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, ketrampilan dan keahlian yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Dalam hal ini diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari uraian latar belakang fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penulisan skripsi ini, adapun judul dari tulisan ini adalah **“Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)” (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)**. Alasan peneliti mengambil tema tersebut karena di Desa Jambangan itu sendiri masih banyak di jumpai masyarakat yang kurang diberdayakan. Dalam mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memberikan sarana agar masyarakat setempat bisa mandiri. Disini yang perlu diperhatikan bagaimana peningkatan mutu SDM dalam mengelola UMK yang ada. Seperti melalui pendidikan ketrampilan, bimbingan dan konsultasi yang lebih berkualitas, serta berkelanjutan baik secara formal maupun non formal. Maka dari itu, untuk mensinkronisasikan program penanggulangan kemiskinan perlu Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang, khususnya di Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing. Sedangkan usaha mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademik
 - a. Sebagai salah satu media dalam mengkaji ilmu di bidang pemerintahan.
 - b. Penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama bangku perkuliahan mengenai teori-teori pemerintahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.
 - c. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan kepada pemerintah Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang terlibat dalam program strategi pemberdayaan UMKM, agar dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan memberikan sarana agar masyarakat bisa mandiri.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengembangkan program dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Malang.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca yang tertarik untuk menekuni profesi dalam bidang pemerintahan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan gambaran susunan skripsi secara singkat. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas dapat

dimengerti dengan jelas dan benar serta menjadi gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas yang mencakup pertanyaan penelitian yang menjadi fokus peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditinjau dari sudut akademik maupun dari sudut praktis, dan sistematika penulisan laporan makalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini ditengahkan berbagai teori serta hasil pemikiran para ahli yang menjadi landasan bagi penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk membentuk pola pemikiran dan analisis yang konstruktif dan ilmiah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Didalam bab ini berisi uraian tentang teori implementasi program, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

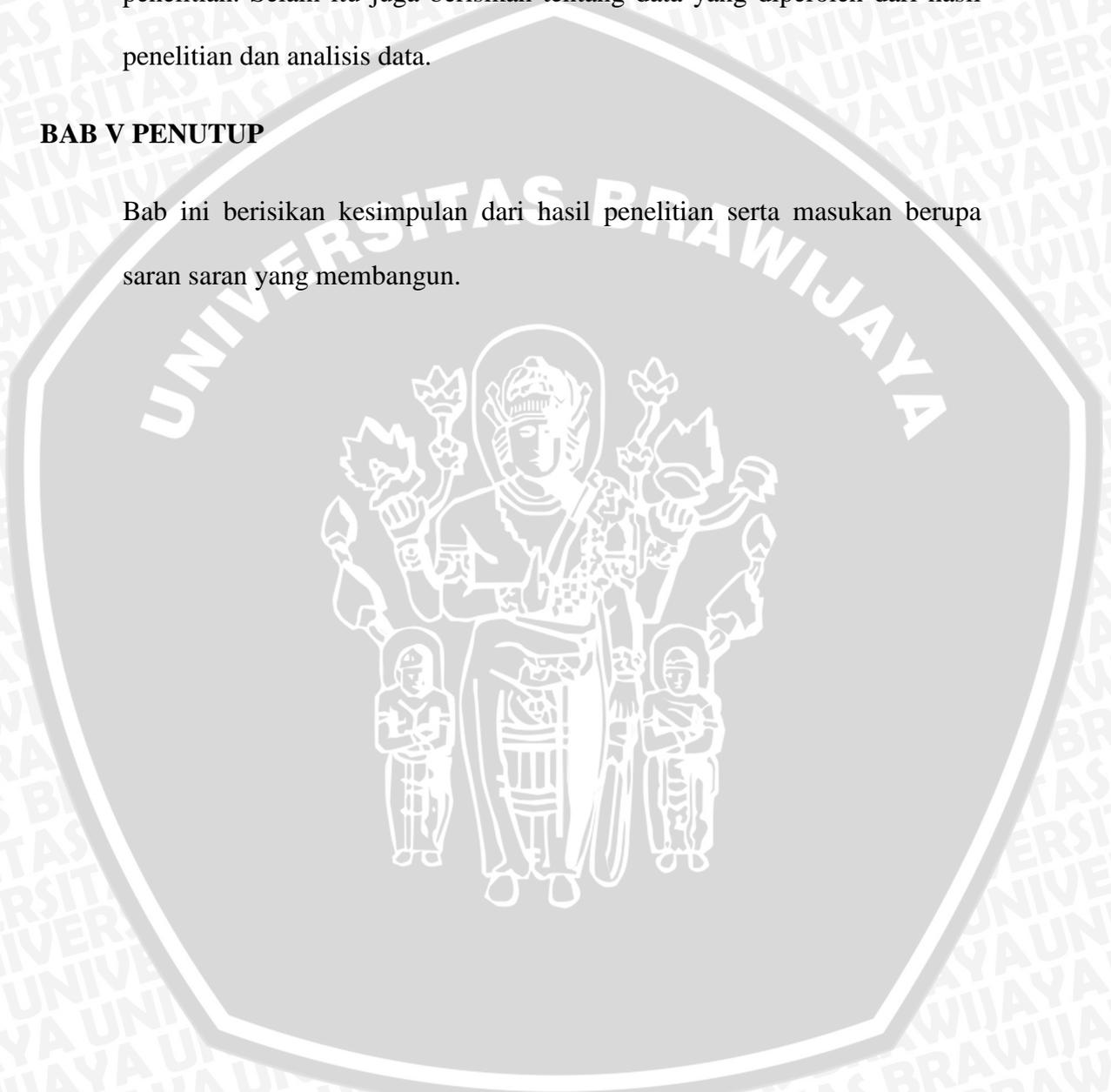
Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian. Selain itu juga berisikan tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta masukan berupa saran saran yang membangun.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik dan pelayanan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dapat dikatakan bahwa administrasi publik adalah pengadministrasian pelayanan publik. Karena komponen utama dari administrasi adalah organisasi dan manajemen, maka administrasi publik adalah pengorganisasian dan manajemen pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka administrasi publik sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Sekalipun sudah dipraktikkan sejak peradaban manusia dimulai, tetapi administrasi publik, sebagai ilmu baru mengalami perkembangan pesat.

Kata administrasi berasal dari dua kata, *ad* dan *ministrare*, yang mempunyai makna membantu atau memberikan jasa. Dalam periode kekaisaran romawi kata administrasi dihubungkan dengan tugas-tugas pelayanan. Istilah administrasi terus berkembang dan digunakan secara luas, disektor privat dan publik. Kini istilah administrasi mengacu kepada bidang atau keahlian maupun bidang keilmuan. Disektor privat dikenal istilah

administrasi niaga, sedangkan disektor publik dikenal istilah administrasi negara atau administrasi publik.

2. Konsep Administrasi Publik

Ada berbagai definisi administrasi publik, yang diusulkan oleh banyak ahli. Barangkali definisi yang paling awal tentang administrasi publik adalah definisi yang disampaikan Wilson: "Sebagai rinci dan sistem hukum publik". Definisi yang diusulkan Wilson amat menekankan sisi politis dan formal administrasi publik. Berdasarkan pandangan diatas, administrasi publik adalah proses operasionalisasi keputusan politik. Dengan demikian White, 1997 memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi.

Administrasi publik terdiri dari semua operasi mereka yang memiliki untuk tujuan mereka pemenuhan atau penegakan kebijakan publik. sistem administrasi publik adalah gabungan dari semua undang-undang, peraturan, praktik, kapal hubungan, kode, dan adat istiadat yang berlaku setiap saat dalam setiap yurisdiksi untuk pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan publik. (White, 1967)

White membedakan antara administrasi dengan sistem administrasi publik. Tentang administrasi publik White memiliki kesamaan dengan Wilson, yaitu administrasi adalah operasionalisasi kebijakan publik atau keputusan publik. Sedangkan tentang sistem administrasi publik White mengatakan sebagai organisasi dan manajemen administrasi publik yang

merupakan kristalisasi secara formal, pengalaman-pengalaman hidup bermasyarakat.

Corson dan Harris (1963), menyusun definisi administrasi publik dalam versi sederhana dan versi lengkap. Dalam versi sederhana, "Administrasi Publik adalah sarana yang tujuan dilaksanakan".

Dalam versi lengkap,

"administrasi publik adalah pengambilan keputusan, perencanaan pekerjaan yang harus dilakukan, merumuskan tujuan dan sasaran, bekerja sama dengan legislatif dan warga organisasi untuk mendapatkan dukungan publik dan dana untuk program-program pemerintah, menetapkan dan merevisi organisasi, mengarahkan dan mengawasi karyawan, memberikan kepemimpinan, komunikasi dan menerima komunikasi, menentukan metode dan prosedur kerja, penilaian kinerja, berolahraga kontrol, dan lain-lain fungsi yang dilakukan oleh eksekutif pemerintah dan pengawas". (Corson dan Harris, 1963)

Dalam definisi yang sederhana Corson dan Harris menekankan substansi administrasi publik, sedangkan dalam definisi yang lengkap, mereka menekankan aktivitas administrasi publik yang terinteraksi dengan lingkungannya yaitu masyarakat dan politik sebagai lingkungan eksternal dan organisasi-manajemen sebagai lingkungan internal.

Nigro dan Nigro, menyusun definisi publik dari sudut pandang yang lebih spesifik, yaitu apa yang dilakukan oleh eksekutif sebagai respons terhadap keputusan politik Negara. "Administrasi Publik adalah tidak dari cabang eksekutif".

3. Fungsi Administrasi Publik

Menurut Tjokroamidjoyo (1991), tiga fungsi utama administrasi publik adalah formulasi atau perumusan kebijakan, pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi

B. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut pembangunan. Jadi, pembangunan nasional suatu bangsa sebenarnya adalah merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa itu, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bukan saja sebenarnya menjadi idam-idaman dari setiap warga negara dan bangsa yang bersangkutan melainkan pula merupakan cita-cita setiap umat manusia.

Jelaslah bahwa Pembangunan Nasional memang suatu langkah atau tindakan untuk memperbaharui kehidupan nasional. Tetapi sebelum itu maka haruslah terlebih dahulu diketahui dengan jelas dan terang mengenai :

1. Keadaan yang hendak di perbaharui;
2. Arah dan cita-cita yang hendak dicapai.

Bagi bangsa Indonesia misalnya sudah jelas bahwa landasan , serta arah dan cita-cita pembangunan bangsa sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan dua hal tersebut kemudian akan dapat ditetapkan jalan tentang bagaimana mengubah keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain sebagaimana mengubah keadaan yang dicita-citakan. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa setiap pembaharuan selalu pula merupakan pembaharuan yang tidak saja meliputi hal-hal lahiriah akan tetapi juga soal batiniah. Karena keadaan yang hendak diubah dan keadaan yang ingin dicapai itu kedua-duanya di dalam pembangunan mendapatkan penilaian masing-masing di dalam alam nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Lebih lanjut untuk memberikan pengertian yang lebih mendasar, tentang arti serta maka pembangunan itu sendiri maka ada baiknya ditinjau beberapa batasan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli, yang antara lain pembangunan menurut Kertasasmita (1997) merupakan proses yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan secara terencana, berkelanjutan dan mengarah pada perbaikan. Upaya yang dilakukan adalah melalui jalan yang tidak merusak, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan

mengembangkan potensi yang ada. Di negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang proses pembangunan dihadapkan pada berbagai kendala antara lain, terbatasnya sumber dana, rendahnya kualitas daya manusia dan pemilihan strategi yang kurang tepat.

Todaro (1996) memberikan pengertian pembangunan sebagai proses multidimensi menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan, peningkatan pendapatan dan *output* pembangunan juga menyangkut perubahan radikal struktural kelembagaan, struktur sosial serta administrasi yang diikuti perubahan sikap, kebiasaan dan kepercayaan.

Menurut pandangan UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dalam upaya tersebut. Konsep ini mengandung tiga unsur penting yaitu produktifitas, pemerataan dan pemberdayaan (Sarman dan Sayogyo, 2000).

Konsepsi selektif di bidang pembangunan ini diperkuat juga oleh teori yang dikemukakan oleh Janssen 1970, yang menyatakan bahwa :

“Pembangunan Masyarakat adalah suatu proses yang multi dimensional yang struktural; perubahan struktural meliputi semua segi aspek kemasyarakatan, tetapi pada permulaan diperlukan terutama pengembangan ekonomi.”

Kemajuan ekonomis harus memberikan dasar material yang diperlukan untuk mendukung pengembangan di bidang yang lain.

Demikian beberapa pendapat yang dipandang perlu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang arti dari pembangunan itu. Tetapi ada beberapa hal

yang perlu mendapat perhatian penekanan dari pengertian dasar pembangunan.

Seperti antara lain bahwa :

- a. Pembangunan itu adalah merupakan suatu proses perubahan yang kontinue atau dengan istilah lain adalah melalui tahap-tahapan. Karena apabila mengabaikan proses pentahapan ini sudah terbukti akan dijumpai banyak kesulitan-kesulitan, bahkan keagalam-kegagalan di dalam pelaksanaannya.
- b. Di samping itu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti antara lain peningkatan taraf hidup masyarakat maka kegiatan awal dimulai dengan pengembangan di bidang ekonomi tanpa melupakan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang lain. Karena dengan kemajuan di bidang ekonomi akan bisa merupakan landasan materill yang diperlukan untuk mendukung pengembangan di bidang yang lain.
- c. Yang penting pula dalam rangka kegiatan pembangunan adalah melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Karena pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan seperti bidang politik, ekonomi sosial budaya dan lain lain baru akan berhasil apabila benar-benar seluruh rakyat di dalam suatu negara ikut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab. Jadi tidak saja para pengambil kebijaksanaan tertinggi, perena, pemimpin pelaksana operasional, yang berperan aktif tetapi juga yang masih tradisional, nelayan, buruh, pedagang kecil dan lain-lain.

Disamping itu dalam rangka pembangunan in, bahwa institusi-institusi permusyawaratan dan lain-lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat, perlu

diperiksa dengan seksama untuk akhirnya nilai-nilai positif dari institusi itu dapat dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional umumnya.

Dengan pemanfaatan institusi yang ada maka diharapkan masyarakat akan lebih bisa dan lebih mampu untuk menguasai kondisi hidupnya, lingkungan alamnya, dan dirinya sendiri.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Arti dan Prinsip

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan

pemantapan, pembudayaan, pengalaman dan pelaksanaan demokrasi. Ada dua alasan penting bagi perencana pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis (Coppock, 1977).

Secara instrinsik, setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap issue pembangunan, sedang secara pragmatis, pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat. Dari sudut pandang lain, pendekatan peran serta masyarakat dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meminimasi ketidakpuasan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, selain untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bernegara dan bermasyarakat (Chesterman & Stone, 1992). Selanjutnya, oleh karena informasi mengenai program pembangunan dapat disampaikan dan dimengerti oleh masyarakat luas, maka anggota masyarakat menjadi lebih kooperatif terhadap pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan memelihara hasil-hasilnya.

Dalam era pembangunan yang semakin maju, peran serta dalam masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ini adalah bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi

masyarakat. Berdasarkan pemikiran diatas, maka diraskan perlu untuk menggali potensi peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat lebih berdaya gunan dan berhasil guna.

Pemberdayaan menurut Ife (1995:56) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “*empowerment aims to increase the power of disadvantage*”. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonard D. White (dalam Suhendara 1998:2) “Apabila proses politik berakhir, maka mulailah proses administrasi”.

Pada amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah banyak meletakkan dasar-dasar politik pemberdayaan masyarakat yaitu :

- Pasal 28 A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28 B.
 - (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28 C.
 - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- Pasal 28 D.

- (1) Setiap orang, berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan upaya-upaya berkelanjutan, membutuhkan kesungguhan serta pengorbanan yang cukup panjang. Amerika Serikat pernah juga mengalami perjuangan pemberdayaan sejak tahun 1880-an. Pada saat industri berkembang pesat, ternyata terjadi ketidakadilan, ketidakmerataan dan kemiskinan. Reaksi dari masyarakat Amerika adalah gerakan reformasi sosial, reformasi agraris yang memunculkan Gerakan Kehidupan Pedesaan (*Country Life Movement*). Gerakan ini akhirnya dapat meyakinkan Kongres Amerika dan menetakan Smith-Lever-Act tahun 1914 yang meletakkan dasar-dasar program penguatan pertanian yang berlangsung hingga kini.

Dari buah karya dan pikiran para pemberdayaan dapat dilihat berbagai dimensi yaitu :

1. Konsep.
2. Proses.
3. Tujuan.
4. Indikator.

Dimensi Konsep

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang mulia karena sangat menghargai harkat dan martabat manusia. Suatu cita yang idealis, suatu *das sollen*. Pemberdayaan masyarakat analogis dengan konsep demokrasi dan kesejahteraan sosial serta kedaulatan rakyat. Dengan kondisi pemberdayaan masyarakat yang tercipta disuatu masyarakat bangsa, maka akan terbentuk suatu sinergis berbagai komponen bangsa ya pemerintah ya masyarakat serta pengusaha. Akan terbentuk tatanan masyarakat yang harmonis, dinamis terhindar dari konflik-konflik sosial yang merugikan. Anggota masyarakat akan dapat mengoptimalkan kreativitas dan aspirasinya, saling bertoleransi, saling menyayangi, terbentuk suatu suasana yang *tat-twan asi, homo sacra res homini* (kamu adalah aku, manusia menyayangi sesama), walau dalam kemajemukan. Semakin modern suatu masyarakat akan menjadi semakin majemuk dari unsur ras, agama, suku, golongan, profesi, akan tetapi dalam tatanan masyarakat yang bedaya akan menjadi “bhineka tunggal ika”, *unity in diversity*. Masyarakat relatif akan menjadi lebih sejahtera, lebih puas karena aspirasinya terakomodasi dalam keputusan dan kebijakan penguasa maupun lembaga-lembaga yang mewakilinya.

Kesenjangan sosial tidak terlampau dalam, namun karenanya potensi kecemburuan sosial dapat diperkecil yang mempunyai ikatan konflik sosial dapat diperkecil. Masyarakat berkuasa dan berdaulat untuk merencanakan, mengelola aser lokal, mengawasi dan menikmati hasil jerih payahnya secara proporsional

dalam tatanan yang penuh santun, modern dan beradab serta terhindar dari suasana “*chaos*” dibawah kepemimpinan dan perwakilan yang aspiratif dan akomodatif.

Dimensi proses

Konsep pemberdayaan masyarakat telah menjadi kuasa kata diberbagai tulisan, lokakarya, seminar dan sebagainya lebih dari tiga dasa warsa di Indonesia. Kita telah *famili* dengan istilah *people empowerment*, *people centered development*, demokrasi, kesejahteraan sosial, kedaulatan rakyat, masyarakat madani (*civil society*). Suatu cita ke realita ternyata khususnya di Indonesia merupakan proses yang memerlukan waktu cukup panjang dan memerlukan banyak pengorbanan Munir pejuang hak-hak asasi manusia Ketua Yayasan Kontras, yang wafat di pesawat terbang sevcara misterius, Marsinah pejuang buruh wanita di Jawa Timur yang juga wafat mengerikan. Peristiwa Semanggi 1997 beberapa orang mahasiswa yang tewas tertembus timah panas. Mereka adalah korban-korban pejuang keadilan dan pemberdayaan yang hingga kini belum terungkap secara tuntas. Hingga kini pemberdayaan masyarakat masih jauh dari kenyataan dan masih memerlukan proses perjuangan, baru merupakan wacana dan retorika.

Pemberdayaan masyarakat dalam prakteknya tidak sederhana seperti yang kita ucapkan berkaitan dengan aspek kemampuan rakyat, kesejahteraan, kultur, struktur maupun “*political will*” penguasa. Kemampuan rakyat, dalam berbagai pertemuan ilmiah kadang berbau politis dikatakan “jangan diremehkan”, karena sejak dahulu rakyat punya keahlian diberbagai bidang : pertanian, industri, kelautan

dan sebagainya. Rakyat mempunyai potensi adalah benar dan tidak terbantahkan, akan tetapi di era global yang penuh kompetitif maka setiap ukuran harus dipersandingkan dengan pihak-pihak lain. Kemampuan, keahlian menjadi sesuatu yang nisbi, relatif. Banyak kendala yang membelenggu percepatan proses pemberdayaan masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang pada tahun 1663 manakala kita dalam cengkaman pemerintah penjajah Hindia Belanda melalui *Indische Straatsregeling* (IS), penduduk Indonesia saat itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Eropa atau yang dipersamakan,
2. Timur Asing, dan
3. Bumi Putra.

Penduduk asli Indonesia suatu kelompok mempunyai kedudukan hukum dan hak-hak sipil yang berbeda. Kita, Bumi Putra pada strata yang paling bawah dari segi ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan. Setelah kita merdeka, dan mengalami pasang surut, akhirnya pada masa Orde Baru kita sempat menikmati *petro dolar*, dan berlangsung gegap gempitanya pembangunan yang diawali dengan Repelita I tahun 1969.

Bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat ?

Pembangunan nasional yang sentralistik selama tiga dekade Orde Baru ternyata tetap menjadikan masyarakat termarginalisasi tidak menjadi lebih berdaya. Perencanaan Nasional yang sentralistik “*top down approach*” tidak menyerap aspirasi dan sistim nilai yang ada di akar rumput. Dengan perencanaan yang

sentralistik, maka keanekaragaman daerah merupakan potensi daerah, spesifikasi *endogenous factor* lainnya di generalisasi, *gebyah uyah* hingga menyebabkan beberapa daerah kurang mampu menyerap perencanaan yang lain dibuat secara nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan secara makro hampir tidak mengangkat kelompok ekonomi lemah, karena porsi kue yang kecil harus dibagikan kepada kelompok besar : buruh tani, buruh nelayan, petani miskin, karyawan pabrik dan juga pengangguran. Tidak heran kalau kelompok maupun wilayah yang merasa diperlakukan tidak adil ini terus melakukan gerakan ketidakpuasan berwujud : mogok kerja, demonstrasi, apatis, enggan bayar pajak malah ada daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional demi kelangsungan pembangunan Pemerintah Orde Baru melakukan tekanan represif. Terjadi pemasungan kreativitas dan inovasi-inovasi rakyat dan masyarakat lokal. Kini pada pasca Orde Baru, suasana demokratis mulai merembak antara lain Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta lahirnya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat tidak seta merta terbentuk, masyarakat berangkat dari awal untuk dimotivasi mengartikulasikan peluang yang baru tersedia, akan memakan waktu berproses. Diperlukan banyak pemimpin-pemimpin lokal pemberdayaan masyarakat, sebagaimana masyarakat sudah apatis, menyerah pada takdir.

Dimensi Tujuan

Pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratis, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berkreativitas, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola aset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat.

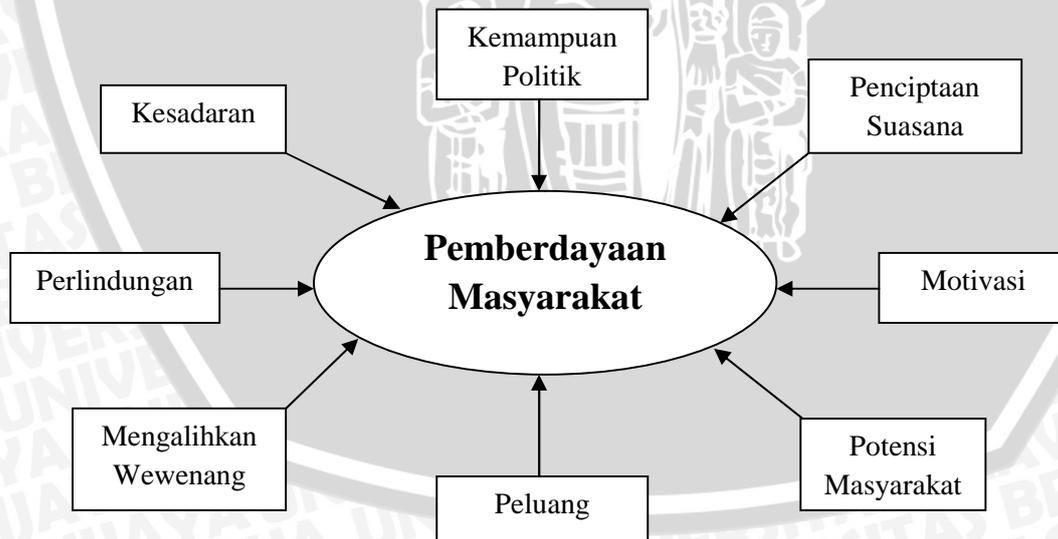
Dimensi Indikator

Kalau suatu ketika akan mengukur apakah pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka perlu indikator. Tinggal membandingkan kriteria normatif dengan realita. Apabila senjangnya kecil pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya apabila senjangnya besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berjalan. Menyertai konsep pemberdayaan masyarakat melekat indikator-indikatornya sebagaimana diuraikan pada ciri-ciri tujuan. Adapun indikator masyarakat yang berdaya adalah :

1. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
2. Dapat berjalannya "*botton up planning*".
3. Kemampuan dan aktivitas ekonomi.
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanda adanya tekanan.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah :

1. Kemauan politik yang mendukung.
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
3. Motivasi.
4. Potensi masyarakat.
5. Peluang yang tersedia.
6. Kerelaan mengalihkan wewenang.
7. Perlindungan.
8. *Awariness* (kesadaran).



Gambar 1: Unsur-unsur Pemberdayaan

D. Strategi Pemberdayaan Koperasi & UMKM

1. Penumbuhan Iklim Usaha

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

a. Aspek Pendanaan

- (1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan, dan lembaga keuangan non bank.
- (2) Membantu Koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan yang disediakan oleh Bank, atau non Bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

- (1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong usaha Koperasi dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- (2) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Aspek Informasi Usaha

- (1) Membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank Data dan Jaringan Informasi Bisnis;

- (2) Menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu.

d. Aspek Kemitraan

- (1) Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar;
- (2) Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan, dalam pelaksanaan transaksi usaha, antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar.

e. Aspek Perizinan Usaha

- (1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu;
- (2) Membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

f. Aspek Promosi Dagang

- (1) Meningkatkan promosi produk Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di dalam dan di luar negeri.
- (2) Memfasilitasi pemilikan hak atas hak kekayaan intelektual atas produk dan desain dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Pengembangan Usaha

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi:

- a. Dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Dalam bidang pemasaran dilakukan dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, dan meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. Dalam bidang sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- d. Dalam bidang desain dan teknologi dengan meningkatkan kemampuan desain, teknologi, pengendalian mutu, dan meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.

3. Pembiayaan dan Penjaminan

- a. Pemerintah mendirikan Bank, yang menyalurkan kredit khusus untuk Usaha Mikro, dan Kecil, tanpa jaminan, dan bunga rendah;
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan dan Penjaminan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;

- c. BUMN, dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan modal kerja dan investasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Menengah.

4. Kemitraan

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha, dan memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- b. Menteri, dan Menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pelatihan.
- c. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, usaha patungan, dan penyumberluaran (outsourcing).

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kondisi umum UMKM di Indonesia dapat digambarkan dari populasi tahun 2007 terdapat 49,8 juta unit usaha yaitu sama dengan 99,9% jumlah unit usaha di Indonesia. Sedangkan penyerapan tenaga kerja = 88,7 juta yaitu sama dengan 96,9% dari seluruh tenaga kerja Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kebijakan pemberdayaan UMKM antara lain dimuat dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM; dan Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014. Dalam UU No. 20/2008 disebutkan antara lain prinsip-prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM.

- Prinsip pemberdayaan UKM, meliputi: (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; (4) Peningkatan daya saing UMKM, dan (e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- Tujuan pemberdayaan UMKM adalah: (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka pemberdayaan UKM pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemitraan, antara lain: PP No. 44/1997 tentang Kemitraan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan. Selanjutnya, diterbitkan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam memberdayakan UKM perlu diperhatikan permasalahan yang dihadapi UKM itu sendiri. Dalam Lampiran Perpres No. 5/2010 tentang

RPJMN 2010-2014, pada buku II Bab III disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain:

- a. Permasalahan belum kondusifnya iklim usaha: Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dan berkompetisi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Koperasi dan UMKM dalam periode 5 tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat: (1) belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga; (2) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (3) keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (4) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan: (1) terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam satu program nasional sebagai langkah strategis pemanduan dan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang mengandalkan kehidupan dari koperasi dan kegiatan UMKM; (2)

terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif, bisnis oriented, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat lokal; serta (4) meningkatkan peran lembaga-lembaga masyarakat pendukung koperasi dan UMKM.

b. Permasalahan pengembangan produk dan pemasaran: Koperasi dan UMKM masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya.

Permasalahan tersebut meliputi: (1) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang; (2) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen; (3) kurangnya insentif untuk berkembangnya lembaga pendukung koperasi dan UMKM; (4) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (value chain); serta (5) masih adanya gap dalam kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumberdaya.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah (1) tersedianya hasil-hasil teknologi dan litbang yang sesuai dengan kebutuhan dan skala koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kemampuan *technopreneurship* koperasi dan UMKM; (3) meningkatnya jumlah kapasitas dan jangkauan lembaga penyedia jasa pengembangan dan pembiayaan usaha; (4) berkembangnya jaringan usaha yang berbasis kemitraan yang kuat; serta

(5) berkembangnya lembaga pendukung usaha yang dapat memfasilitasi perkembangan potensi dan posisi tawar usaha mikro.

- c. Rendahnya kualitas SDM, dicirikan oleh: (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi; (c) masalah rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelola usaha.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah: (1) berfungsinya sistem pengembangan budaya usaha dan kompetensi wirausaha sesuai dengan karakteristik koperasi dan UMKM; (2) meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi, terutama dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif; dan mengembangkan usaha pemasaran produknya; (3) meningkatnya kualitas dan sistem pengembangan kompetensi usaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi; serta (4) meningkatnya budaya wirausaha dan daya tahan usaha mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitaitaif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Meleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasannya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangatlah penting dan diperlukan untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar permasalahan. Menurut Meleong (2007:94), penentuan fokus penelitian memiliki tujuan, yaitu :

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang dibahas oleh peneliti.
2. Dalam penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar, suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data/informasi apa yang akan dikumpulkan, dan data/informasi mana yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sudah dikumpulkan.

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti ini maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi dalam pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

- a. Penumbuhan Iklim Usaha
- b. Pengembangan Usaha
- c. Pembiayaan dan Penjaminan
- d. Kemitraan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

- a. Faktor pendukung dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
 - 1) Faktor Internal
 - 2) Faktor Eksternal
- b. Faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
 - 1) Faktor Internal
 - 2) Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi peneliti ini merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang valid atau informasi yang akurat, yang benar-benar

diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian adalah sebagai tempat peneliti dalam mengungkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dengan demikian, yang menjadi situs dalam penelitian ini agar dapat memperoleh gambaran deskripsi tentang implementasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
3. Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
4. Penduduk Asli Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang terlibat dalam UMKM Produksi Opak.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Alasan lain karena Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian merupakan salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan ekonomi di wilayah Kabupaten Malang baik yang berupa potensi Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya, sehingga dengan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pedoman akan kejelasan dari hasil penelitian nantinya. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh oleh peneliti yang secara langsung. Dalam penelitian tersebut, yang dimaksud dengan data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui responden secara langsung melalui kegiatan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari aparaturnya Pemerintah Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan masyarakat Desa Jambangan. Adapun yang menjadi subyek data primer adalah :

- a. Bapak Gupuh Prawito selaku Perangkat Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- b. Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
- c. Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.

- d. Ibu Puput selaku pengusaha Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- e. Ibu Neni selaku pegawai di tempat produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- f. Ibu Yunan selaku pegawai di tempat produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan melalui data yang telah ada pada sebelumnya. Dalam penelitian tersebut, yang termasuk dalam data sekunder adalah pada data-data yang telah ada atau dimiliki. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini biasanya diperoleh dari internet, dokumen, catatan, arsip, perpustakaan, peraturan atau undang-undang dan laporan-laporan peneliti terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar, artikel, jurnal dan majalaah yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, teknis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan melalui observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan indera mata. Serta dibantu dengan panca indra lainnya. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2013:64) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek penelitian tersebut, selain itu dengan teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi dan situasi secara umum yakni mengenai letak geografis, sarana dan prasarana yang mendukung serta struktur organisasi didalamnya. Teknik ini untuk mengetahui kebenaran-kebenaran data primer yang diberikan oleh Kepala Desa, perangkat-perangkatnya serta masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan.

2. Wawancara atau *interview*

Menurut Moh. Nazir yang dikutip Burhan Bungin (2001:133) wawancara atau yang biasa disebut *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk dapat memperoleh data primer tentang Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Wawancara tersebut dilakukan dengan :

- a. Bapak Gupuh Prawito selaku Perangkat Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- b. Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
- c. Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang.
- d. Ibu Puput selaku pengusaha Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- e. Ibu Neni selaku pegawai di tempat produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
- f. Ibu Yunan selaku pegawai di tempat produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:82) dokumentasi merupakan catatan dalam peristiwa yang telah berlalu dan bisa terbentuk suatu tulisan, sebuah gambaran, atau karya-karya monumentasi dari seseorang. Keberadaan dokumen disini merupakan pelengkap dari pengguna teknik dalam observasi

dan wawancara. Dalam dokumen dapat berupa data-data yang tertulis, dokumen-dokumen, atau laporan-laporan resmi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah atau arsip-arsip untuk pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah :

1. Peneliti sendiri

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat atau instrument dari penelitian sesuai dengan yang dikatakan Sugiyono (2013:59) yang menjadi alat atau instrument penelitian dari yang telah diamati serta mencatat peristiwa yang terjadi. Di dalam melakukan suatu pengamatan, secara langsung peneliti menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, serta merasakan fenomena yang ada disekitarnya, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* berguna sebagai alat atau instrument penelitian karena dengan menggunakan pedoman wawancara ini, maka wawancara menjadi lebih sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjawab semua data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *notebook* atau buku catatan serta menggunakan alat perekam yang dapat digunakan pada saat wawancara. Dengan menggunakan perangkat penunjang, maka kegiatan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.

G. Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2013:334), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam penelitian metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang digunakan oleh Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya tidak jenuh. Aktivitas dalam analisis data Milles and Huberman (Dalam Saldana. J, 2013:12), yaitu data *condensation*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Analisis data kualitatif model Milles and Huberman terdapat tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian

direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyutingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

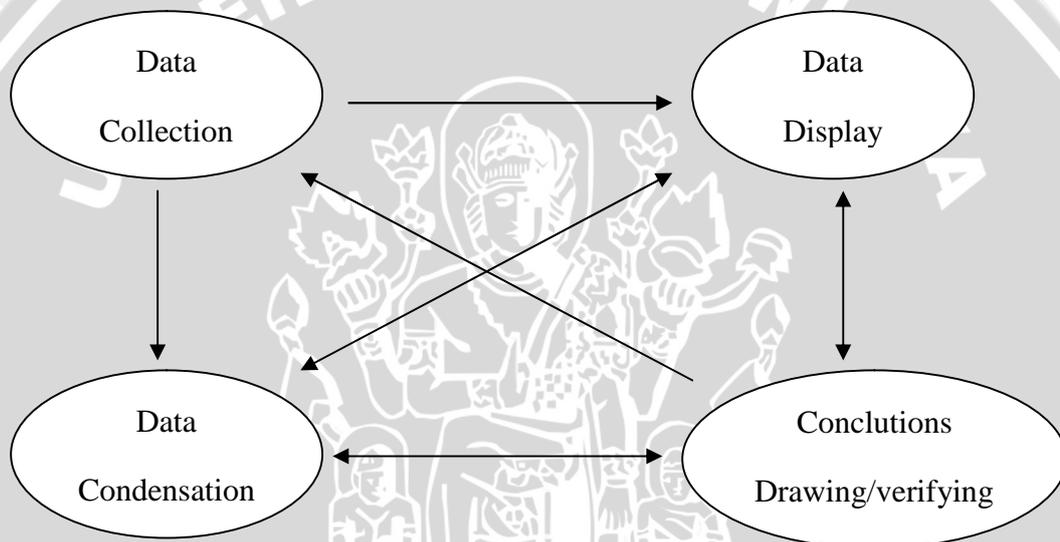
Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelomponya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap model analisis data Milles dan Huberman dapat digambarkan dengan alur skema sebagai berikut :



Gambar 2: Komponen dalam Analisis Data (*interactive model*)

Sumber : Milles and Huberman (dalam Saldana. J, 2013:12)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Malang



Gambar 3: Peta Kabupaten Malang
Sumber: www.malangkab.go.id

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa

setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Ibu Kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Kabupaten Malang juga di kenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga di kenal dengan obyek-obyek wisatanya.

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90`` sampai 112°57'00`` Bujur Timur, 7°44'55,11`` sampai 8°26'35,45`` Lintang Selatan.

Batas wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Malang :

- a) Sebelah Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
- b) Sebelah Timur : Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
- c) Sebelah Barat : Kab. Blitar dan Kab. Kediri
- d) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

b. Geologi

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran Tinggi, Wilayah ini dipagari oleh :

- a) Utara : Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399m)
- b) Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)

- c) Barat : Gunung Kelud (1.731m)
- d) Selatan : Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

c. Topografi

- a) Daerah dataran rendah terletak pas ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut
- b) Daerah Dataran Tinggi
- c) Daerah Perbukitan Kapur
- d) Daerah Lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut – dpal)
- e) Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m dpal)

d. Fisiografi

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri.

e. Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian yang agraris yaitu :

- a) Kali Brantas : Bermata air di Dk. Sumber Brantas, Desa

Tulungrejo (Batu), Membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah ini berakhir di Bendungan Karangates.

b) Kali Konto : Mengalir melintasi wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang).

c) Kali Lesti : Mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai yang mempunyai arti penting.

d) Kali Amprong : Mengalir di bagian Timur, wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

2. Desa Jambangan

Jambangan adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Jambangan memiliki jarak 10 Km dari Kecamatan dampit dan 37 Km dengan ibukota/ Kabupaten Malang, sedangkan luas wilayah 1.992,2 Ha, terdiri dari :

- a. Sawah : 193 Ha
- b. Tegal/ Ladang : 1.118,70 Ha
- c. Pemukiman : 320 Ha
- d. Pekarangan : 225 Ha
- e. Situ/ Waduk/ Danau : 0,25 Ha

- f. Perkebunan : 58 Ha
- g. Fasilitas Umum : 74,25 Ha
- h. Hutan : 3 Ha

Batas-batas wilayah Desa Jambangan Kecamatan Dampit :

- a. Sebelah Utara : Desa Sanan Kerto Kec.Turen
- b. Sebelah Selatan : Desa Pojok/ Dampit Kec.Dampit
- c. Sebelah Timur : Perhutani Kec.Tirtoyudo
- d. Sebelah Barat : Desa Pagedangan Kec.Turen

Iklim Desa Jambangan Kecamatan Dampit :

- a. Curah hujan : 0 mm
- b. Jumlah bulan hujan : 0 Bulan
- c. Kelembapan : 0
- d. Suhu rata-rata harian : 39 °C
- e. Tinggi tempat dari permukaan laut : 400 Mdl

Komunikasi Desa Jambangan Kecamatan Dampit :

- a. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan : 10 Km
- b. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten/Kota : 37 Km
- c. Jarak Desa ke Ibukota Provinsi : 80 Km

Desa Jambangan dihuni oleh 2627 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 10601 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 5297 Jiwa

dan penduduk perempuan 5304 Jiwa. Adapun mata pencaharian penduduk

Desa Jambangan adalah :

Tabel 1: Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

Sektor Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang)	Jumlah Buruh/ Karyawan / Pengumpul (Orang)
1. Pertanian	1332	3997	936
2. Perkebunan	0	1000	433
3. Peternakan	0	63	
4. Perikanan	0	0	0
5. Kehutanan	0	0	0
7. Pertambangan dan Bahan Galian C	0	0	0
8. Perdagangan	0	0	0
9. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga			Jumlah (Orang)
• Montir			43
• Tukang batu			49
• Tukang kayu			4
• Tukang sumur			0
• Pemulung			10
• Tukang jahit			10
• Tukang kue			2
• Tukang anyaman			5
• Tukang rias			2
• Pengrajin industri rumah tangga lainnya			10
•			
10. Industri Menengah dan Besar			
• Karyawan perusahaan swasta			0
• Karyawan perusahaan pemerintah			0
• Pemilik perusahaan			0
•			0
•			
11. Sektor Jasa			
• Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan			0
• Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan			0

• Pemilik usaha informasi dan komunikasi	0
• Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	0
• Kontraktor	0
• Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	0
• Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	0
• Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	0
• Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	0
• Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	0
• PegawaiNegeriSipil	34
• TNI	12
• POLRI	3
• Dokterswasta	2
• Bidanswasta	0
• Perawatswasta	0
• Dukun/paranormal/supranatural	0
• Jasa pengobatanalternatif	0
• Dosenswasta	0
• Guruswasta	17
• PensiunanTNI/POLRI	2
• PensiunanPNS	1
• Pensiunanswasta	0
• Pengacara	0
• Notaris	0
• JasaKonsultansiManajemendan Teknis	0
• Seniman/artis	2
• Pembanturumahtangga	
• Sopir	
• Buruhmigranperempuan	
• Buruhmigranlaki-laki	
• Usahajaspengerahtenaga kerja	0
• Wiraswastalainnya	0
• Tidak mempunyai matapencapaian tetap	0
• Jasa penyewaanperalatanpesta	6
•	

Sumber: Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit

3. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No.15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dalam melaksanakan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

a) Visi

Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh dan mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian Kabupaten Malang yang bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dan menjadi fasilitator yang memiliki kompetensi tinggi

Penjelasan dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat tangguh dan mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi, diharapkan dapat terwujudnya peningkatan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah yang bertambah

mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi keamanan, politik dan ekonomi berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

b) Misi

Misi adalah segala sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Terwujudnya Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang gharus dihadapi oleh segenap personil Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkanlah Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh Organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang serta mengetahui peran dan program-program serta memahami hasil yang akan diperoleh dimasa akan datang.

Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetrapkan Undang-undang dan Perda dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Membina dan mengawasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4) Memantapkan Keterkaitan Jaringan Usaha Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Mendorong Kelompok-kelompok usaha sejenis yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat untuk bergabung dalam wadah Koperasi.
- 6) Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan yang Sehat, Tangguh dan Mandiri serta Memiliki Daya Saing yang Tinggi di lingkungan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c) Tujuan

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :

- a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM
 3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM melalui meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
 4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pasar produk Koperasi dan UMKM.
 5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Peminjam Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

6. Pengembangan Wirausahawan Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausahawan baru yang inovatif
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaiki Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih baik berpihak pada Koperasi dan UMKM.

b. Kebijakan Program

a) **Latar Belakang**

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar perekonomian. Dengan demikian pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat urgen dan vital. Oleh karena itu pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus selaras dengan perkembangan otonomi daerah, sehingga Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru.

b) Arah Kebijakan

1. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan profuktifitas dan daya saing, sedangkan pengembangan skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh kembangkan wira usaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
3. Mengembangkan Koperasi dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.
4. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan Koperasi.

b. Perkembangan Koperasi dan UMKM

a. Jumlah Koperasi

Tabel 2: Jumlah Koperasi di Kabupaten Malang

No	Kategori	2013	2014	2015
1	Koperasi	1.095	1.104	1.123
2	Anggota	265.788	271.313	277.962
3	Modal Sendiri (000)	538.315.162	594.024.902	636.424.543
4	Modal Luar (000)	838.147.766	865.457.695	918.516.178
5	Jumlah Aset (000)	1.378.462.939	1.459.482.597	1.554.932.805
6	Volume Usaha (000)	1.704.325.149	932.160.221	2.003.671.233
7	SHU (000)	29.110.571	15.994.172	35.189.614

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang*

b. Kondisi Kesehatan KSP/USP

Tabel 3: Kondisi Kesehatan KSP/USP

No	Uraian	2012	2013	2014
1	Jumlah Koperasi	1.072	1.095	1.104
2	Belum Layak Dinilai	639	552	563
3	Sudah Layak Dinilai	433	543	541
4	Sudah Dinilai	178	181	187
	-Sehat	124	142	146
	-Cukup Sehat	54	39	41
	-Kurang Sehat	-	-	-
	-Tidak Sehat	-	-	-

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang*

c. Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2013 sebanyak **273.101**

Unit. Menyerap tenaga kerja **510.503** Orang dan Omset Rp.

27.683.892,000- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4: Kondisi UMKM

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah UMKM	414.516	415.022
	- Usaha Mikro (Unit)	298.266	298.766
	- Usaha Kecil (Unit)	115.019	115.119
	- Usaha Menengah (Usaha)	1.231	1.231
2	Tenaga Kerja (Org)	1.255.031	1.285.031
3	Omzet (000)	41.848.153	41.849.458.300

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang*

c. Struktur Organisasi

a. Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang terbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;

- b) Perencanaan strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- f) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g) Pelayanan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- h) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i) Pembinaan UPTD;
- j) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- l) Pembinaan kepada masyarakat tentang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- m) Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- n) Pelaksanaan bimbingan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Susunan Organisasi

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang terdiri dari :

a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Memimpin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perijinan, pengendalian teknis pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikann dan penggandaan, kearsipan;

6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Pengkoordinasian/ menyusun rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan , urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan baranag, peralatan, mendistribusikan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Mengkopilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka Organisasi pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.

c) Bidang Bina Kelembagaan Koperasi

Bidang Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengembangan organisasi dan hukum penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia serta melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Bina kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan pengaturan pencatatan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina kelembagaan Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Organisasi dan Hukum

Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan penyusunan bahan pedoman pembinaan standarisasi organisasi dan tata laksana Koperasi;
- b. Menyiapkan dan penyusunan pelaksanaan pedoman peningkatan koperasi;
- c. Menghimpun dan mensosialisaikan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi;
- d. Melakukan pembinaan tentang kedudukan hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;

- e. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain, penggabungan dan peleburan koperasi;
- f. Melakukan evaluasi tentang standar pelayanan koperasi;
- g. Memproses pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi.

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- b. Melaksanakan pengaturan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan perkembangan koperasi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan koperasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif;
 - b. Menyiapkan, merumuskan dan penyusunan bahan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
 - c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian;
 - d. Memberikan bimbingan dari konsultasi kepada pengelola koperasi dan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang mendirikan koperasi;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif;
 - f. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi.
- d) Bidang Bina Usaha Koperasi

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijaksanaan dalam rangka pembangunan, pembinaan dan pengawasan usaha koperasi;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi;
3. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi;
4. Pelaksanaan penguatan jaringan usaha koperasi;
5. Pengawasan usaha dan manajemen koperasi.

Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan

Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha koperasi dan manajemen usaha koperasi dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.

2. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan

Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai tugas :

a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan usaha koperasi dibidang Perdagangan, Industri dan Pertambangan;

b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dibidang Perdagangan, Industri dan Pertambangan;

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi dibidang Perdagangan, Industri dan Pertambangan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.

3. Seksi Peternakan dan Perikanan

Seksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

a. Melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;

- b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasann terhadap usaha dan manajemen koperasi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.
- c. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan kegiatan bidang Usaha simpan pinjam; fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan serta permodalan;
2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman pengembangan di bidang usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

2. Melaksanakan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan jasa keuangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;
5. Memfasilitasi penjaminan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan

Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun pedoman dalam rangka fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan bagi usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank/ non bank dengan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembinaan fasilitas pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan.

2. Seksi Pengembangan dan Pengembangan Simpan Pinjam

Seksi Pengembangan dan Pengembangan Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman dalam rangka pengendalian kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melakukan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;

- e. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan usaha simpan pinjam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan.

3. Seksi Permodalan

Seksi Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan permodalan bagi usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Melakukan pembinaan dan motivasi pembentukan modal sendiri maupun modal luar terhadap kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Memfasilitasi perkuatan permodalan bagi usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui modal penyertaan pemerintahan, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya;
 - d. Melakukan pemantau, pengawasan dan evaluasi kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan.
- d. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijaksanaan teknik dan pembangunan dan pengembangan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan dan usaha dan kerjasama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga keuangan bank/ non bank;
3. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan usaha dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan;
- b. Melakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
- c. Melakukan upaya dalam rangka pengembangan wirausaha baru;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
- e. Melakukan Identifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama

Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pengembangan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan, Usaha dan kerjasama koperasi, pengusaha

Mikro, Kecil dan Menengah, dan kerjasama dengan Swasta, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD, lembaga keuangan bank/ non bank;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai tugas :

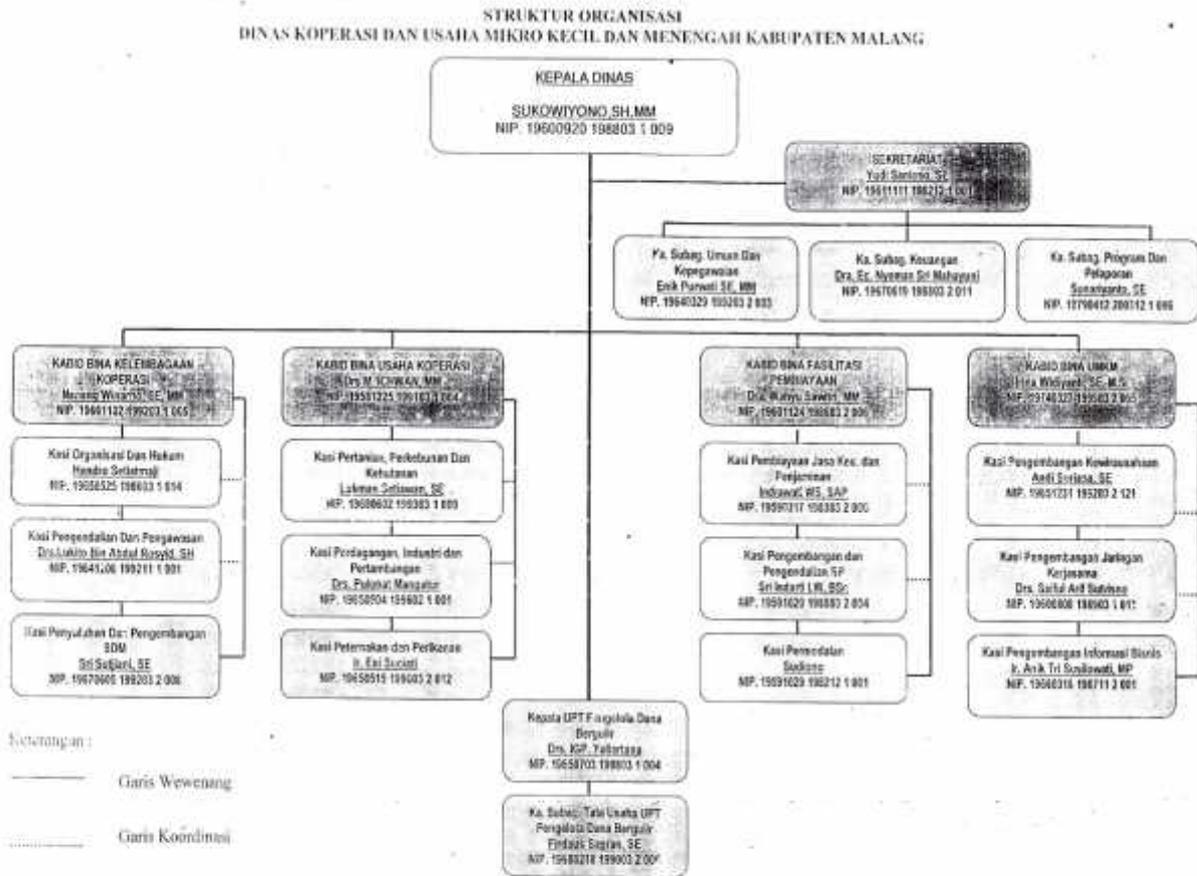
- a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Melakukan pembinaan untuk pengembangan system informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Melakukan pendistribusian informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. UPTD tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah tertentu.
2. UPTD Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pas ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4: Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Malang
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Malang



B. Penyajian Data

1. Strategi dalam pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

a. Penumbuhan Iklim Usaha

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

a) Aspek Pendanaan

Dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas kepada UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kredit mikro tanpa agunan melalui Bank-Bank pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu persoalan modal bagi UMKM. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Cara Dinas dalam memfasilitasi akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selain itu juga memfasilitasi melalui Bank yaitu pada program KUR, dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Ushaa Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Untuk mendapatkan bantuan modal biasanya para pengusaha masih mengalami kesulitan, karena dengan adanya jaminan dan perijinan tidak semua para pengusaha memahami itu. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan bantuan modal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa :

“Untuk mendapatkan modal kadangkala harus ada jaminan dan perijinan, maka dari itu memang perlu adanya pendampingan secara terus menerus, perlu adanya penyuluhan. Disamping itu juga harus ada koordinasi dengan Dinas terkait”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha khususnya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas terkait. Namun selama ini dari pengusaha opak itu sendiri kurang mampu memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas, selain itu juga kurang adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Permasalahannya seperti ini, para pengusaha belum ada pemikiran untuk mendekati Dinas, yang ada dipikiran para pengusaha itu bekerja terus-menerus dan mampu memasarkan hasil produksinya”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dari pengusaha itu sendiri kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput Selaku pengusaha opak di Desa Jambangan yang mengatakan bahwa :

“Kalau dari Dinasnya itu sendiri sudah bagus, mungkin dari masyarakatnya sendiri kurang bisa memanfaatkan karena mungkin mereka terbiasa cari aman bekerja dapat uang gitu saja. Belum ada spekulasi kalau punya modal segini buat usaha ini kemudian dikembangkan gitu belum ada. Mungkin dari masyarakatnya yang tidak terbiasa bisnis jadi kurang bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh pemerintah”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Ibu Puput juga menambahkan bahwa :

“Dulu disini itu pernah diberikan permodalan tapi gak jalan. Orang-orang disini diberikan modal kan seharusnya buat modal usaha, tapi modal itu gak kembali, kadangkala ada yang usaha itu cuma sebentar terus gak jalan lagi. Dari Dinas sendiri itu iya sudah bagus untuk permodalan iya sudah diberikan bantuan , masyarakatnya sendiri itu yang kurang bisa memanfaatkan”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Disini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dalam menumbuhkan iklim usaha dalam akses permodalan, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten Malang khususnya pengusaha opak di Desa Jambangan

Kecamatan Dampit. Tetapi dalam hal ini pilihan diarahkan kepada masyarakat yang menjalankan untuk bisa mengembangkan usahanya apa hanya diam ditempat. Karena dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri tidak hanya tergantung dari Dinas saja, masyarakat juga harus ikut aktif dan mau kenal dengan Dinas terkait.

b) Aspek Sarana dan Prasarana

Pemerintah mengadakan prasarana umum untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian tentu saja telah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

"Di Kabupaten Malang itu sendiri terdapat banyak desa, untuk pembinaan dalam memberikan pelatihan dari desa tersebut harus meminta jenis pelatihan yang seperti apa harus mengetahui Kepala Desa dan Camat. Sebelum melakukan pelatihan terlebih dahulu di survey dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, dan mengharuskan menginventarisasi desa kemudian inventarisasi permasalahannya seperti apa. Dari situ dapat dilihat potensinya seperti apa, untuk kedepannya bagaimana untuk bisa bersaing ke wilayah yang lain". (Wawancara hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa :

“Untuk UMKM yang ingin mendapatkan pembinaan dan pelatihan harus membuat surat keterangan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat, kemudian diserahkan kepada Dinas terkait. Sehingga Dinas mengetahui pembinaan yang seperti apa yang diinginkan oleh UMKM di Desa tersebut”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Mengembangkan suatu usaha memang tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha itu sendiri, mereka juga membutuhkan dukungan serta bantuan fasilitas, motivasi dan inovasi dari pemerintah. Namun dalam hal ini pengusaha opak kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Yang ada dalam pikiran para pengusaha itu hanya bekerja terus menerus untuk mendapatkan uang, mereka belum kepikiran untuk mendekati Dinas”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pengusaha itu sendiri belum mendekati Dinas terkait untuk mengajukan proposal agar diadakannya pembinaan dan pelatihan, sehingga pengusaha tersebut juga belum pernah mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini belum pernah ada pelatihan untuk opak, namun untuk yang lainnya sudah. Untuk opak belum pernah mengajukan proposal ke Dinas”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak di Desa Jambangan yang mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pelatihan itu mungkin sudah ada, tapi kalau saya belum pernah mendapatkan pelatihan. Karena mungkin dari awal itu kami usaha sendiri jadi tau-tau disini sudah ada industri opak. Kalau dari kadernya mungkin tau ada pelatihan apa saja, tapi untuk mensosialisasikan ke masyarakatnya itu yang sulit. Jadi kadang iya ketinggalan informasi apalagi bagi yang rumahnya jauh dari Kantor Desa memilih tidak datang kalau ada pelatihan-pelatihan dan yang datang itu pasti kader-kadernya”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai juga menambahkan yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini kami usaha sendiri dan untuk pelatihan pada opak itu masih belum pernah, kalau untuk pelatihan yang lain itu sudah pernah”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan usaha yang ada dalam para pengusaha khususnya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang juga harus ikut berperan aktif dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait apa yang dibutuhkan oleh pengusaha opak untuk mengembangkan usahanya. Sehingga para pengusaha dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka seperti untuk

diadakannya pembinaan di Desa tersebut. Untuk selanjutnya Dinas akan melakukan survey dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan menginventarisasi permasalahannya seperti apa. Jadi dengan adanya hubungan yang baik antara pengusaha dan pemerintah juga akan membuat industri menjadi berkembang dan dapat menumbuhkan iklim usaha.

c) Aspek Informasi Usaha

Dalam menumbuhkan iklim usaha harus dilakukan secara terintegrasi, yang artinya memberikan kemudahan-kemudahan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dalam berbagai hal seperti pada aspek informasi usaha. Selain itu juga perlu adanya pendampingan dan koordinasi dari Desa itu sendiri dengan Dinas terkait. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

“Untuk menumbuhkan iklim usaha harus terintegrasi, memberikan kemudahan terhadap IKM seperti adanya penyuluhan yang diminta dari Desa. Kemudian ada yang mendampingi, adanya koordinasi dan tidak perlu takut untuk meminta bantuan pada Dinas. Produk kemasan yang bagaimana, PIRT harus ke Dinkes, jadi bisa terintegrasi semua. Jadi untuk menumbuhkan iklim usaha itu tidak harus dari instansi terkait, yang bersangkutan juga harus aktif”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Dalam penumbuhan iklim usaha ini disisi lain juga ada kelemahan permasalahan UMKM yang ada di desa-desa. Seperti yang

disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

“Kelemahan masalah UMKM di desa-desa itu karena pendidikan rendah, modalnya kecil, teknologi sederhana apa adanya, dan masalah kesehatan juga perlu dibina untuk menumbuhkan iklim usaha. Sistem pemasaran yang baik agar bisa bersaing harus menumbuhkan iklim usaha agar mempunyai mutu yang baik. Apalagi saat ini dengan adanya MEA harus mampu bersaing seperti yang dilakukan pada program dari provinsi seperti adanya *nutrition fax* yaitu dilihat takaran kalori/lemaknya seperti apa. Yang kedua harus ada SOP (Standart Operasional Prosedur). Jadi dengan adanya *nutrition fax* dan SOP itu bisa ditampilkan pada kemasan sehingga mampu bersaing dengan produk lain”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Pada dasarnya pemerintah memang perlu untuk memberikan pendampingan yang terus menerus untuk memberikan kemudahan terhadap IKM dalam menumbuhkan iklim usaha, seperti adanya penyuluhan yang diminta dari desa tersebut. Tetapi apabila masyarakatnya sendiri kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas terkait maka dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri juga akan mengalami kesulitan. Karena dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri masyarakat juga harus ikut berperan aktif dan tidak perlu malu-malu untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait.

d) Aspek Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Dengan adanya kemitraan diharapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjalin kerja sama dengan Usaha Besar yang nantinya dapat saling menguntungkan satu sama lain. Namun untuk di Kabupaten Malang itu sendiri belum ada kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Seperti yang disampaikan oleh Iby Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa :

“Untuk di Kabupaten Malang sendiri masih belum ada bentuk kemitraan yang dilakukan, namun ada sistem konsinyasi yang artinya produk yang sudah siap dijual dititipkan kepada agen dan kemudian dibayar”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang menyatakan bahwa :

“Untuk masalah kemitraan saya kurang tau, seperti yang sudah saya katakan tadi karena pada awalnya kami memulai sendiri dan tidak ada bantuan dari desa. Pada akhirnya meraka tau disini sudah jadi industri rumahan yang memproduksi opak dan belum ada kemitraan dengan pihak swasta atau pengusaha besar”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk di Kabupaten Malang saat ini masih belum ada bentuk kemitraan yang terjalin antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar,

namun ada sistem konsinyasi dengan agen dan kemudian dibayar. Dengan adanya sistem konsinyasi ini yang ditakutkan adalah saat pengusaha menitipkan hasil produksinya itu langsung dibayar apa tidak, jika saja tidak langsung dibayar itu yang menjadi kendala dalam mengembangkan usaha adalah modal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

“Kendala dalam mengembangkan usaha itu adalah modal, seperti konsinyasi kita menitip itu langsung dibayar apa tidak. Itu yang membuat UMKM tidak berkembang”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Dalam hal inilah yang menjadi tugas penting dari pemerintah untuk selalu memberikan pembinaan secara terintegrasi, serta adanya pendampingan secara terus-menerus. Disamping itu juga perlu adanya penyuluhan tentang bentuk kemitraan yang ada di Kabupaten Malang, namun untuk saat ini masih menggunakan sistem konsinyasi tersebut.

e) Aspek Perizinan Usaha

Dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas mengenai perizinan usaha kepada UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir.Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa :

“Dinas memberikan fasilitas dengan sosialisasi kepada UMKM tentang perizinan dasar seperti PIRT dan SIUP itu harus kemana. Dan untuk yang belum mempunyai surat izin usaha akan difasilitasi untuk mengurus surat izin usaha”. (Wawancara hari Rabu 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dari Dinas terkait telah memfasilitasi para pengusaha UMKM untuk mendapatkan perizinan usaha. Hal itulah yang seharusnya dapat di manfaatkan dengan baik oleh para pengusaha. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Untuk perizinan usaha mudah, tetapi saya hanya punya PIRT saja. Kamarin itu karena saya belum punya PIRT, dari Desa mereka memberikan informasi cara mengurus kemudian dikasih formulir buat pendaftaran dan kemudian mereka mengajukan ke Dinkes. Setelah itu di informasikan lagi untuk ke Dinkes dan selanjutnya diberikan pengarahan tentang pengurusan perizinan usaha”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dapat disimpulkan bahwa untuk penumbuhan iklim usaha pada aspek perizinan usaha, koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan perangkat desa sangat dibutuhkan. Sehingga untuk informasi-informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat khususnya pengusaha UMKM produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Selain itu dari pengusaha itu sendiri harus ikut berperan aktif dan tidak hanya tergantung dari Dinas terkait.

f) Aspek Promosi Dagang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMKM yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Dinas adalah memfasilitasi promosi produk-produk UKM, membuat/memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama, dan untuk membantu memasarkan hasil produksi kami bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Terlihat bahwa pemerintah sendiri telah melakukan berbagai cara untuk membantu para pengusaha UMKM untuk memasarkan hasil produksinya. Jadi dalam hal ini juga harus adanya koordinasi dengan Dinas terkait, dan yang bersangkutan juga harus ikut aktif dan tidak segan-segan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait.

b. Pengembangan Usaha

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi.

a) Bidang Produksi dan Pengolahan

Dalam menghadapi persaingan dunia usaha khususnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin ketat, para

pengusaha dituntut untuk dapat mengembangkan hasil produksinya agar usaha yang dijalankan dapat berkembang pesat dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Apalagi disini produk yang dihasilkan adalah makanan yang bisa dikatakan termasuk jajanan tradisional yang mungkin saat ini masyarakat jarang menjumpai yaitu opak gambir. Selain itu para pengusaha dalam mengembangkan usahanya harus mempunyai inovasi-inovasi untuk menciptakan berbagai macam bentuk dan rasa dari opak gambir itu sendiri, sehingga dengan adanya inovasi tersebut masyarakat akan lebih tertarik dengan produk yang dihasilkan oleh para pengusaha opak. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ibu Puput selaku pengusaha Opak Gambir yang menyatakan bahwa :

“Kalau saya dulu pertama itu membuat opak yang bentuknya kerucut tapi besar, terus karena permintaan dari konsumen apalagi masyarakat kota bentuk kerucut yang besar itu tidak praktis kalau dibawa kemana-mana untuk dijadikan oleh-oleh jadi kami merubah bentuk opak kerucut besar menjadi kerucut kecil. Terus habis itu membuat yang bentuk rol dan dolar, kemudian baru-baru ini saya membuat bentuk lipat yang kecil. Kalau dari bentuk iya seperti itu, dan untuk rasa dulu cuma ada rasa wijen dan jahe, terus ini bentuk lipat yang baru rasa pisang asli”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.00 di Tempat Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai industri opak yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk inovasi kami mencoba rasa-rasa yang belum pernah sebelumnya dan membuat bentuk opak yang baru”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.25 di Tempat Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Gambar 5 : Macam-macam bentuk opak yang sudah jadi



Sumber: Dokumentasi penulis (2015)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Puput selaku pengusaha Opak serta Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai industri opak bahwa dalam menjalankan usahanya selama ini sudah melakukan berbagai macam inovasi untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan mampu membuat produksi opak menjadi meningkat dan masyarakat juga menjadi lebih tertarik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5 yaitu adanya macam-macam bentuk opak yang telah diproduksi.

Selain itu dalam mengembangkan usahanya para pengusaha juga masih mengalami beberapa hambatan-hambatan yang terjadi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli dan terampil, pemasaran hasil produksi, dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang menyatakan bahwa :

“Untuk saat ini modal kami usaha sendiri, kadang kalau kesulitan pinjam di Bank BRI. Dan untuk tenaga kerja sendiri masih kurang

disiplin, apalagi untuk yang usia tua kadang sulit untuk diarahkan dan kurang telaten dan dalam menjaga kualitas sering berubah-ubah”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.00 di Tempat Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Yuyan selaku pegawai di industri opak yang menyatakan bahwa :

“Saat ini kami sedang berjuang sendiri, untuk mengembangkan usaha juga asli usaha sendiri dan pemasarannyapun juga sendiri, kadang kalau ada pameran dibawa oleh PNPM”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.25 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa :

“Dalam mengembangkan usaha yang dilakukan oleh Dinas adalah dengan melakukan diklat pendidikan dan pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi wirausaha baru, memberikan sosialisasi”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 10.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas kepada para pengusaha khususnya untuk wirausaha baru untuk diberikan pelatihan ketrampilan. Namun untuk mendapatkan pelatihan tersebut harus membuat surat keterangan atau pengajuan proposal kepada Dinas terkait agar mendapatkan pelatihan yang diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri

Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

“Untuk UMKM yang ingin mendapatkan pembinaan dan pelatihan harus membuat surat keterangan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat, kemudian diserahkan kepada Dinas terkait. Sehingga Dinas mengetahui pembinaan yang seperti apa yang diinginkan oleh UMKM di Desa tersebut”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Adanya fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha IKM di Kabupaten Malang khususnya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit untuk mendapatkan pelatihan tentang kewirausahaan guna untuk mengembangkan usahanya. Namun itu semua tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha opak di Desa Jambangan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Untuk Pembinaan dan Pelatihan khusus untuk produksi opak belum ada, tapi untuk yang lainnya sudah pernah ada pembinaan dan untuk opak belum pernah mengajukan”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk pelatihan itu mungkin sudah ada, tapi kalau saya belum pernah mendapatkan pelatihan. Karena mungkin dari awal itu kami usaha sendiri jadi tau-tau disini sudah ada industri opak.

Kalau dari kadernya mungkin tau ada pelatihan apa saja, tapi untuk mensosialisasikan ke masyarakatnya itu yang sulit. Jadi kadang iya ketinggalan informasi apalagi bagi yang rumahnya jauh dari Kantor Desa memilih tidak datang kalau ada pelatihan-pelatihan dan yang datang itu pasti kader-kadernya”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dapat disimpulkan bahwa pengusaha opak di Desa Jambangan kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas terkait, jika saja mereka mampu memanfaatkan dengan baik itu semua juga akan membawa dampak baik bagi perkembangan usaha yang ada.

b) Bidang Pemasaran

Dalam mengembangkan usaha pemasaran merupakan bagian yang paling penting dari sebuah usaha produksi, karena faktor pemasaran sangat menentukan dalam penjualan. Selama ini pemerintah telah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMKM yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan oleh Dinas adalah memfasilitasi promosi produk-produk UKM, membuat/memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama, dan untuk membantu memasarkan hasil produksi kami bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Namun pada kenyataannya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit masih mengalami kendala dalam memasarkan hasil produksi opak. Selama ini untuk pemasaran opak masih menggunakan cara yang sederhana yaitu dari mulut ke mulut, selain itu juga ada agen yang mengambil untuk dibantu pemasarannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk pemasaran ada dari agen di Malang yang kesini mengambil untuk dibantu dalam pemasaran, dan untuk pembayaran biasanya yang sudah diambil kemarin dibayar sama ambil yang baru”. (Wawancara hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 pukul 12.30 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai di industri opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini pemasaran kami lakukan sendiri, kadang kalau ada pameran dibawa oleh PNPM”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran hasil produksi opak masih dilakukan sendiri, dan inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini peran pemerintah memang diperlukan, disini dari Dinas terkait telah memberikan fasilitas dalam promosi produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Selain itu juga memfasilitasi para pengusaha dengan memberikan berbagai pembinaan dan penyuluhan untuk

membantu dalam mengembangkan usahanya. Namun dari masyarakatnya sendiri kurang bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang telah diberikan dan kurang adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Karena dalam hal ini juga harus adanya peran aktif dari para pengusaha itu sendiri.

c. Pembiayaan dan Penjaminan

Bagi seorang pelaku usaha kebutuhan dana diibaratkan sebagai urat nadi dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Seorang pelaku usaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh dana bagi pengembangan usahanya. Kendala utama pengembangan UMKM di Indonesia adalah persoalan permodalan, manajemen dan teknologi. Untuk persoalan permodalan, UMKM sering mengalami kendala untuk mengakses pinjaman melalui jalur perbankan khususnya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan perbankan.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kredit mikro tanpa agunan melalui Bank-Bank pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mengatasi persoalan modal bagi UMKM. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Cara Dinas dalam memfasilitasi akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selain itu juga memfasilitasi melalui Bank yaitu pada program KUR, dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha industri khususnya industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu untuk memperoleh tambahan dana guna kelancaran usahanya. Namun yang selama ini terjadi dari pengusaha itu sendiri kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas, selain juga itu kurang adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Permasalahannya seperti ini, para pengusaha belum ada pemikiran untuk mendekati Dinas, yang ada dipikiran para pengusaha itu bekerja terus-menerus dan mampu memasarkan hasil produksinya”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah bahwa para pengusaha kurang mampu untuk mendekati Dinas dan melakukan koordinasi. Apabila para pengusaha mampu untuk mendekati Dinas

terkait dan meminta bantuan terhadap apa yang menjadi permasalahan mereka selama ini, dari Dinas itu sendiri pasti akan memberikan bantuan. Disamping itu apabila para pengusaha masih mengalami kesulitan terutama untuk mendapatkan bantuan dana tentu juga akan selalu diberikan pembinaan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa :

“Untuk pembinaan itu harus terintegrasi, kadangkala untuk mendapatkan modal harus ada jaminan dan perijinan. Maka dari itu memang perlu adanya pendampingan terus menerus, perlu adanya penyuluhan. Disamping itu juga harus ada koordinasi dengan Dinas terkait”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, serta pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk membantu para pengusaha dalam mendapatkan bantuan dana. Namun para pengusaha juga harus mampu memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dengan tidak malu-malu mendekati Dinas terkait untuk meminta bantuan. Jadi dalam hal ini memang diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas terkait agar apa yang selama ini menjadi permasalahan para pengusaha dapat teratasi dengan baik dan dapat membantu dalam mengembangkan usahanya.

d. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan itu sendiri mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan adanya kemitraan ini di harapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjalin kerja sama dengan Usaha Besar yang nantinya dapat saling menguntungkan satu sama lain dalam berbagai hal. Namun untuk di Kabupaten Malang itu sendiri belum ada kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Puput selaku pengusaha Opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk masalah kemitraan saya kurang tau, seperti yang sudah saya katakan tadi karena pada awalnya itu kami memulai sendiri dan tidak ada bantuan dari desa. Pada akhirnya mereka tau disini sudah jadi industri rumahan yang memproduksi opak dan belum ada kemitraan dengan pihak swasta atau pengusaha besar”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.00 di Tempat Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Untuk di Kabupaten Malang sendiri masih belum ada bentuk kemitraan yang dilakukan, namun ada sistem konsinyasi yang

artinya produk yang sudah siap dijual dititipkan kepada agen dan kemudian dibayar” (Wawancara hari Rabu 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Dengan adanya sistem konsinyasi pada UMKM di Kabupaten Malang sebenarnya yang membuat UMKM itu sendiri menjadi tidak berkembang. Karena dalam mengembangkan usaha yang menjadi masalah selama ini adalah modal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa :

“Kendala dalam mengembangkan usaha itu adalah modal, seperti konsinyasi kita menitip itu dibayar apa tidak. Itu yang membuat UMKM tidak berkembang”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem konsinyasi yang ditakutkan adalah saat pengusaha menitipkan hasil produksinya itu langsung dibayar apa tidak, jika saja tidak langsung dibayar inilah yang menjadi kendala dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal inilah yang menjadi tugas penting dari pemerintah untuk selalu memberikan pembinaan secara terintegrasi, serta adanya pendampingan secara terus-menerus. Disamping itu perlu adanya penyuluhan tentang bagaimana bentuk kemitraan yang ada di Kabupaten Malang, namun untuk saat ini Kabupaten Malang belum ada bentuk kemitraan yang dilakukan

melainkan menggunakan sistem konsinyasi tersebut. Dan untuk membantu dalam pemasaran hasil UMKM yang ada, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMK yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Dinas adalah memfasilitasi promosi produk-produk UKM, membuat/memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama, dan untuk membantu memasarkan hasil produksi kami bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Terlihat bahwa pemerintah sendiri telah melakukan berbagai cara untuk membantu para pengusaha UMKM untuk memasarkan hasil produksinya. Jadi dalam hal ini harus ada koordinasi dengan Dinas terkait, dan yang bersangkutan juga harus ikut aktif dan tidak segan-segan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Kebijakan dalam pengembangan Industri kecil yang ada khususnya pada industri Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil Menengah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan untuk ikut dalam melestarikan makanan daerah serta untuk membangun kehidupan para pengusaha kecil agar dapat mensejahterahkan kehidupannya. Untuk mewujudkan perkembangan Industri Opak yang mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang disukai oleh banyak konsumen dan pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kualitas produksi yang nantinya bisa mensejahterahkan para pengusaha kecil. Namun dalam setiap kegiatan pasti sering dijumpai faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang sedang berjalan. Seperti halnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memberdayakan industri opak saat ini.

a. Faktor Pendukung

1) Bahan baku mudah didapat

Industri kecil merupakan industri yang masih bergantung pada kesediaan bahan baku di pasaran. Jika saja bahan baku yang dibutuhkan susah untuk didapatkan maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi yang nantinya dapat menyebabkan UKM menjadi tidak berkembang. Namun untuk produksi usaha opak itu sendiri bahan baku yang dibutuhkan tidaklah sulit, sehingga untuk memproduksi opak dalam jumlah banyak tidak dikhawatirkan berhenti hanya karena bahan baku.

2) Lokasi yang strategis

Dalam mengembangkan suatu usaha pemilihan lokasi yang tepat juga penting untuk mengembangkan usaha yang sedang berkembang. Untuk industri opak itu sendiri lokasinya berada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit, dan untuk di desa itu sendiri lokasinya sangat luas dan transportasi juga sangat mudah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang menyatakan bahwa :

“Untuk lokasi industri opak itu sangat strategis, di desa sendiri mempunyai lokasi yang luas dan transportasi yang mudah untuk pengiriman”. (Wawancara hari Selasa 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi yang strategis mampu mempengaruhi keberhasilan dalam mengembangkan suatu usaha. Apabila pemerintah mampu melihat peluang yang ada, di Desa Jambangan itu sendiri mampu dijadikan sebagai sentra produksi UKM bukan hanya dari produksi opak saja, melainkan juga produk lain yang telah ada di desa tersebut. Namun dalam hal ini juga diperlukan adanya koordinasi dan para pengusaha juga haus ikut aktif untuk perkembangan kedepannya.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan industri kecil. Selama ini sumber daya

manusia yang ada pada industri kecil merupakan sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan dalam pengelolaan industri, dan ketrampilan yang terbatas. Hal ini disebabkan dari latar belakang pendidikan yang masih rendah, dan ini lah yang menyebabkan industri susah untuk berkembang dan selalu terjebak dalam permasalahan yang sama. Selama ini kualitas sumber daya manusia yang ada pada industri opak bisa dikatakan masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Saat ini dalam industri opak yang saya jalankan ada 35 tenaga kerja, namun dari semua tenaga kerja yang ada tidak semuanya bisa masuk kerja. Setiap hari itu ada saja alasan tidak masuk, kan disini itu di desa jadi kalau tetangga sebelah ada acara apa atau kalau mau hajatan harus saling membantu. Jadi untuk tenaga kerja setiap hari itu tidak semuanya bisa masuk hanya seberapa saja”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Selain dari ketidakdisiplinan para tenaga kerja, yang menjadi masalah lain adalah untuk mendapatkan tenaga kerja itu sendiri masih sulit. Di desa itu sendiri untuk mengarahkan anak-anak muda dan mengajak untuk bekerja itu masih sulit. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di katakan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk sumber daya manusia sendiri khususnya anak-anak muda itu susah diajak untuk bekerja di desa dan mereka lebih suka untuk ke kota, selain itu untuk yang usia tua juga lebih memilih untuk berkebun. Jadi yang mau diajak kerja itu hanya ibu-ibu muda yang telaten”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Bukan hanya ketidakdisiplinan dan susah mencari tenaga kerja, untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada para pegawai juga masih mengalami kendala. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk tenaga kerja yang usianya sudah tua itu sulit untuk diarahkan, dalam menjaga kualitas opak itu kadang-kadang masih sering berubah-ubah”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada industri opak yang ada terlihat masih rendah. Hal tersebut tentunya juga akan membawa dampak yang negatif apabila opak yang dihasilkan kualitasnya berubah-ubah tentunya akan mendapat komplain dari konsumen. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai di industri opak yang menyatakan bahwa :

“Kadangkala kami menerima komplain dari agen karena hasilnya kurang memuaskan, ini dikarenakan kadang kami dalam membuat opak kalau sudah capek dan lagi tidak bersemangat bisa membuat hasil opak itu sendiri kurang memuaskan”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.25 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi perkembangan industri kecil. Hal ini seperti yang telah disampaikan dalam wawancara, jika saja para tenaga kerja mudah untuk diberikan bimbingan dan arahan dengan baik maka juga akan membawa

dampak yang positif terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti adanya komplain dari konsumen yang tidak puas dengan hasil produksi opak. Sehingga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam memproduksi opak, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah berusia tua harus penuh kesabaran untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan yang benar untuk meningkatkan kualitas opak yang dihasilkan.

Bukan hanya dengan mengandalkan keuletan dan kesabaran yang dimiliki, bantuan dari pemerintah sendiri juga diperlukan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia agar menjadi sumber daya yang berkualitas. Sehingga dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu untuk mengembangkan produk usaha opak dengan tetap menjaga kualitas dan tetap dapat eksis di pasaran. Namun, dalam hal ini tentunya juga diperlukan adanya koordinasi dengan Desa dan Dinas terkait.

2) Kurangnya Modal Usaha

Hampir setiap orang selalu mengeluhkan masalah modal ketika mereka hendak memulai sebuah usaha. Karena modal merupakan faktor yang cukup penting dalam menjalankan usaha. Memiliki keterbatasan atau modal yang kecil dalam menjalankan sebuah usaha pasti akan menghambat laju perkembangan kegiatan bisnis tersebut. Bahkan meskipun peluang usaha dari bisnis yang dijalani bagus akan tetapi

bisnis tersebut tidak akan dapat berkembang jika kekurangan modal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Permasalahan yang umumnya dihadapi adalah modal, jika saja peluangnya bagus tapi kekurangan modal akan tetap saja sulit dalam mengembangkan usaha”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Oleh karena itu dalam hal ini pengusaha opak yang ada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang mengalami hambatan modal, terutama untuk membeli bahan baku apabila mendapatkan banyak pesanan dan juga untuk membeli peralatan lainnya. Permasalahan modal ini merupakan permasalahan yang umumnya dirasakan oleh para pengusaha khususnya pengusaha opak, karena selama ini pengusaha opak masih kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal. Kadangkala untuk mendapatkan tambahan modal pengusaha opak melakukan pinjaman kepada Bank. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk modal saat ini kami berusaha sendiri, kadang pinjam ke Bank BRI. Kalau mendekati Hari Raya itu butuh stok yang banyak dan kami mengajukan pinjaman ke Bank, kalau hari biasa masih bisa diatasi dengan memakai modal sendiri”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Selain itu Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai di industri opak juga menambahkan bahwa :

“Permasalahan utama yang kami hadapi adalah modal, dan untuk saat ini kami berjuang sendiri”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.25 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Kekurangan modal usaha yang dialami pengusaha opak tergantung pada jumlah produksinya. Permintaan produksi meningkat saat Hari Raya dan untuk mendapatkan tambahan modal pengusaha melakukan pinjaman kepada Bank. Jadi untuk menjalankan usaha faktor modal memang memiliki peran yang sangat penting untuk kelancaran dan pengembangan usaha.

Peran Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dalam memberikan akses permodalan memang sangat diperlukan. Dalam hal ini pemerintah sendiri telah memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan tambahan dana dengan mengajukan kepada Dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ir. Anik Tri Susilowati, MP selaku Kasi Pengembangan Informasi Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa :

“Cara Dinas dalam memfasilitasi akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selain itu juga memfasilitasi melalui Bank yaitu pada program KUR, dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM”. (Wawancara hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang).

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha industri khususnya industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu untuk memperoleh tambahan dana guna kelancaran usahanya. Namun yang selama ini terjadi dari pengusaha itu sendiri kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas, selain juga itu kurang adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Permasalahannya seperti ini, para pengusaha belum ada pemikiran untuk mendekati Dinas, yang ada dipikiran para pengusaha itu bekerja terus-menerus dan mampu memasarkan hasil produksinya”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah bahwa para pengusaha kurang mampu untuk mendekati Dinas dan melakukan koordinasi. Apabila para pengusaha mampu untuk mendekati Dinas terkait dan meminta bantuan terhadap apa yang menjadi permasalahan mereka selama ini, dari Dinas itu sendiri pasti akan memberikan bantuan. Disamping itu apabila para pengusaha masih mengalami kesulitan terutama untuk mendapatkan bantuan dana tentu juga akan selalu diberikan pembinaan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rifai Akhmad selaku Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Industri Hasil Hutan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa :

“Untuk pembinaan itu harus terintegrasi, kadangkala untuk mendapatkan modal harus ada jaminan dan perijinan. Maka dari itu memang perlu adanya pendampingan terus menerus, perlu adanya penyuluhan. Disamping itu juga harus ada koordinasi dengan Dinas terkait”. (Wawancara hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 pukul 11.00 di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang).

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, serta pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu untuk membantu para pengusaha dalam mendapatkan bantuan dana. Namun para pengusaha juga harus mampu memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dengan tidak malu-malu mendekati Dinas terkait untuk meminta bantuan. Jadi dalam hal ini memang diperlukan adanya koordinasi dengan Dinas terkait agar apa yang selama ini menjadi permasalahan para pengusaha dapat teratasi dengan baik dan dapat membantu dalam mengembangkan usahanya.

3) Pemasaran hasil produksi

Pemasaran merupakan bagian yang paling penting dari sebuah usaha produksi, karena faktor pemasaran sangat menentukan dalam penjualan. Selama ini untuk promosi pemasaran opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang masih menggunakan cara yang sederhana yaitu dari mulut ke mulut. Selain itu juga ada agen

yang mengambil untuk dibantu pemasarannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Puput selaku pengusaha opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk pemasaran ada dari agen di Malang yang kesini mengambil untuk dibantu dalam pemasaran, dan untuk pembayaran biasanya yang sudah diambil kemaren dibayar sama ngambil yang baru”. (Wawancara hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 pukul 12.30 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Yunan selaku pegawai di industri opak yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini pemasaran kami lakukan sendiri, kadang kalau ada pameran dibawa oleh PNPM”. (Wawancara hari Selasa tanggal 29 September 2015 pukul 13.00 di tempat produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemasaran hasil produksi opak masih dilakukan sendiri, dan ini yang merupakan salah satu permasalahan dalam mengembangkan usaha. Karena dalam mengembangkan usaha bukan hanya dari modal yang cukup serta adanya kemampuan tenaga kerja yang ahli, namun pemasaran juga menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah usaha. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Gupuh Prawito selaku Kepala Desa Jambangan Kecamatan Dampit yang mengatakan bahwa :

“Permasalahan disini adalah dalam mencari pelanggan atau pemasaran. Karena usaha apapun itu yang dihadapi pasti masalah pemasaran, jika modal sudah ada tapi belum tau pemasarannya harus kemana itulah yang menjadi permasalahan dalam

mengembangkan usaha”. (Wawancara hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 pukul 12.00 di Kantor Desa Jambangan Kecamatan Dampit).

Terlihat bahwa pada usaha opak yang ada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit permasalahan yang dihadapi selain kekurangan modal usaha dan lemahnya tenaga kerja, yang menjadi permasalahan lain adalah pemasaran hasil produksi. Dimana untuk memasarkan hasil produksi opak masih dilakukan sendiri dengan menitipkan pada agen. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam mengembangkan usaha opak. Dalam hal ini peran dari pemerintah memang diperlukan, namun semua itu juga harus adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi para pengusaha dengan memberikan berbagai pembinaan dan penyuluhan untuk membantu dalam mengembangkan usahanya, dan disini juga harus adanya peran aktif dari para pengusaha itu sendiri.

C. Pembahasan

1. Strategi dalam pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

a. Penumbuhan Iklim Usaha

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Menurut BPS (2003) mengidentifikasi delapan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha di Indonesia, diantaranya yaitu: kurang permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha, kesulitan bahan baku, kurangnya kemampuan teknis produksi dan keahlian, kurangnya ketrampilan manajerial, kurangnya manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan/perundangan).

Melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian diharapkan mampu menumbuhkan iklim usaha bagi Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya pada industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selama ini dari Dinas terkait telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang meliputi beberapa aspek yaitu:

a) Aspek Pendanaan

Pemerintah memberikan fasilitas kepada UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank melalui Bank-Bank pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu persoalan modal bagi UMKM. Selain itu memfasilitasi akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan

ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM. Namun untuk mendapatkan bantuan modal biasanya para pengusaha masih mengalami kesulitan, karena dengan adanya jaminan dan perijinan tidak semua para pengusaha memahami itu.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pendampingan kepada para pengusaha yang ingin mendapatkan bantuan modal. Disini pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dalam menumbuhkan iklim usaha dalam akses permodalan, pemerintah telah memberikan fasilitas kepada para pengusaha UMKM di Kabupaten Malang khususnya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Namun selama ini pengusaha opak kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan dari Dinas terkait. Disini pilihan diarahkan kepada masyarakat yang menjalankan untuk bisa mengembangkan usahanya apa hanya diam ditempat. Karena dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri tidak hanya tergantung dari Dinas saja, masyarakat juga harus ikut aktif dan mau kenal dengan Dinas terkait.

b) Aspek Sarana dan Prasarana

Penumbuhan iklim usaha melalui aspek sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas terkait. Namun sebelum adanya pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu para pengusaha khususnya

pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit harus membuat surat keterangan mengetahui Kepala Desa dan Camat yang kemudian diserahkan kepada Dinas terkait. Setelah itu Dinas akan mengetahui pembinaan dan pelatihan yang seperti apa yang diinginkan oleh Desa tersebut. Namun terlebih dahulu Dinas melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk inventarisasi desa dan untuk selanjutnya inventarisasi permasalahan yang ada.

Adanya koordinasi yang baik maka dapat diketahui potensi yang ada pada Desa tersebut. Memang mengembangkan usaha diperlukan adanya bantuan, dukungan, dan motivasi dari pemerintah, namun juga harus terjalin koordinasi yang baik dan tidak segan-segan meminta bantuan kepada Dinas terkait. Dengan adanya hubungan yang baik antara pengusaha dan pemerintah juga akan membuat industri menjadi berkembang dan dapat menumbuhkan iklim usaha.

c) Aspek Informasi Usaha

Dalam menumbuhkan iklim usaha harus dilakukan dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dalam berbagai hal seperti pada aspek informasi usaha. Kadangkala para pemilik usaha tidak memahami dengan informasi-informasi yang telah diberikan oleh Dinas terkait. Sehingga dalam hal ini perlu adanya pendampingan dan koordinasi dari Desa itu sendiri dengan Dinas terkait.

Pada dasarnya pemerintah memang perlu untuk memberikan pendampingan yang terus menerus untuk memberikan kemudahan terhadap IKM dalam menumbuhkan iklim usaha, seperti adanya penyuluhan yang diminta dari desa tersebut. Tetapi apabila masyarakatnya sendiri kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dinas terkait maka dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri juga akan mengalami kesulitan. Karena dalam menumbuhkan iklim usaha itu sendiri masyarakat juga harus ikut berperan aktif dan tidak perlu malu-malu untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait.

d) Aspek Kemitraan

Dengan adanya kemitraan diharapkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menjalin kerja sama dengan Usaha Besar yang nantinya dapat saling menguntungkan satu sama lain. Namun untuk di Kabupaten Malang itu sendiri belum ada kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Saat ini di Kabupaten Malang masih menggunakan sistem konsinyasi, yang artinya menitipkan hasil produksi kepada agen kemudian dibayar. Namun yang ditakutkan adalah pada saat menitipkan barang itu langsung dibayar apa tidak, karena nantinya bisa menghambat pengembangan usaha.

Dalam hal inilah yang menjadi tugas penting dari pemerintah untuk selalu memberikan pembinaan secara terintegrasi, serta adanya pendampingan secara terus-menerus. Disamping itu juga perlu adanya

penyuluhan tentang bentuk kemitraan yang ada di Kabupaten Malang, namun untuk saat ini masih menggunakan sistem konsinyasi tersebut.

e) Aspek Perizinan Usaha

Pemerintah memberikan fasilitas perizinan usaha kepada UMKM yang ada di Kabupaten Malang dengan sosialisasi tentang perizinan dasar seperti PIRT dan SIUP harus kemana. Dan untuk yang belum mempunyai surat ijin usaha akan difasilitasi untuk mengurus surat ijin usaha. Hal itulah yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha UMKM di Kabupaten Malang.

Adanya koordinasi yang baik dari Desa dengan Dinas terkait sangat diperlukan, sehingga untuk informasi-informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat khususnya pengusaha UMKM produksi opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Selain itu dari pengusaha itu sendiri harus ikut berperan aktif dan tidak hanya tergantung dari Dinas terkait.

f) Aspek Promosi Dagang

Selama ini yang menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha yang bergerak pada bidang usaha kecil menengah adalah masalah pemasaran. Inilah yang menjadi tugas penting dari pemerintah untuk membantu para pengusaha UMKM di Kabupaten Malang untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada.

Cara yang dilakukan oleh Dinas adalah dengan memfasilitasi promosi produk-produk UKM, membuat/memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama, dan untuk membantu memasarkan hasil produksi Kabupaten Malang bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.

b. Pengembangan Usaha

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat, para pengusaha khususnya pengusaha opak dituntut untuk dapat mengembangkan hasil produksinya agar usaha yang dijalankan dapat berkembang pesat dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Raharjana (2003:17) menemukan dua faktor yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil, yaitu pertama, dari dalam (*internal*) yang berupa kemampuan pada diri seorang pengusaha untuk mengembangkan suatu usaha. Kedua, faktor dari luar (*eksternal*) yang berupa kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi usaha yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor internal adalah kemampuan pada diri seseorang untuk maju, misalnya etos kerja

yang tinggi, kemampuan manajemen yang baik, serta keberanian untuk berinovasi, sedangkan faktor yang eksternal adalah berupa bantuan modal dari pemerintah atau lembaga, luasnya akan permintaan barang, kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan sebagainya.

Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

a) Bidang Produksi dan Pengolahan

Saat ini pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang telah melakukan berbagai macam inovasi dengan membuat macam-macam bentuk opak dan menciptakan rasa-rasa terbaru dari opak yang diproduksi. Dengan adanya inovasi yang dilakukan mampu membuat opak tersebut diminati oleh masyarakat dan permintaan produksi menjadi meningkat. Disisi lain dalam mengembangkan usahanya para pengusaha juga mengalami hambatan yang terjadi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli dan terampil, pemasaran hasil produksi, dan sebagainya. Menurut Departemen Koperasi berdasarkan hasil dari berbagai kajian, pengusaha tersebut selalu menghadapi kelemahan baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Menurut Arafat (2005), kelemahan dari sisi internal tersebut antara lain: (a) kelemahan memperoleh peluang pasar dan mendapat bagian dari pasar; (b) kelemahan dalam struktur permodalan; (c) kelemahan di bidang organisasi dan manajemen; (d) keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi; (e) keterbatasan dalam memperoleh informasi

untuk melakukan usaha dan atau kerjasama usaha. Sedangkan kelemahan dari sisi eksternal antara lain: (a) iklim usaha yang kurang mendukung karena persaingan yang tidak adil dan tidak sehat di antara pelaku ekonomi; (b) sarana dan prasarana perekonomian yang kurang memadai dan terbatas; (c) pembinaan instansi terkait kurang padu dan masih berdasarkan sektor teknis fungsional.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa permasalahan yang umumnya dialami oleh pengusaha opak adalah permodalan, pemasaran hasil produksi, tenaga kerja yang ahli/terampil, dan sebagainya. Namun semua itu bisa diatasi dengan melakukan diklat dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru, memberikan sosialisasi, memfasilitasi pembuatan jaringan kerjasama dengan retail pasar modern, dan untuk memasarkan hasil produksi UMKM Kabupaten Malang bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.

Mengembangkan suatu usaha memang tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha itu sendiri, mereka juga membutuhkan dukungan serta bantuan fasilitas, motivasi, dan inovasi dari pemerintah. Disamping itu juga adanya pendampingan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah juga sangat membantu IKM untuk terus berkembang. Dalam mengembangkan usaha para pengusaha khususnya pengusaha opak yang ada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit

Kabupaten Malang juga harus ikut berperan aktif dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait apa yang dibutuhkan oleh pengusaha opak untuk mengembangkan usahanya. Sehingga para pengusaha dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka seperti untuk diadakannya pembinaan di Desa tersebut. Jadi dengan adanya hubungan yang baik antara pengusaha dan pemerintah juga akan membuat industri menjadi berkembang dan dapat menumbuhkan iklim usaha.

b) Bidang Pemasaran

Dalam mengembangkan usaha pemasaran merupakan bagian yang paling penting dari sebuah usaha produksi, karena faktor pemasaran sangat menentukan dalam penjualan. Selama ini pemerintah telah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMKM yang ada dengan memfasilitasi promosi produk-produk UKM, membuat/memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama, dan untuk membantu memasarkan hasil produksi kami bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.

Namun pada kenyataannya pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit masih mengalami kendala dalam memasarkan hasil produksi opak. Dalam hal ini peran pemerintah memang diperlukan, disini dari Dinas terkait telah memberikan fasilitas dalam promosi produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Selain itu juga

memfasilitasi para pengusaha dengan memberikan berbagai pembinaan dan penyuluhan untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Namun dari masyarakatnya sendiri kurang bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang telah diberikan dan kurang adanya koordinasi dengan Dinas terkait. Karena dalam hal ini juga harus adanya peran aktif dari para pengusaha itu sendiri.

c. Pembiayaan dan Penjaminan

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjaminan kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Seorang pelaku usaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh dana bagi pengembangan usahanya. Kendala utama pengembangan UMKM di Indonesia adalah persoalan permodalan, manajemen dan teknologi. Untuk persoalan permodalan, UMKM sering mengalami kendala untuk mengakses pinjaman melalui jalur perbankan khususnya berkaitan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan perbankan.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kredit mikro tanpa agunan melalui Bank-Bank pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mengatasi persoalan modal bagi UMKM. Selain itu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM.

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha industri khususnya industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu untuk memperoleh tambahan dana guna kelancaran usahanya.

d. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Menurut Sumintarsih (2003:145), bahwa industri rumah tangga pada umumnya dihadapkan pada berbagai kendala yang sebenarnya bersifat klasik, yaitu modal, pemasaran, dan manajemen. Untuk mengatasi masalah ini salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengaitkan mereka dengan eksportir dalam hubungan subkontrak. Sistem subkontrak menciptakan suatu kaitan antara pihak pemesan

(*principal*) dengan pihak produsen (*subkontraktor*). Keterkaitan ini ditunjukkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak *principal* maupun produsen. Untuk pihak *principal*, misalnya harus menyediakan modal, bahan baku, dan melaksanakan pemasaran, sedangkan pihak produsen melakukan proses produksi dan menyediakan tenaga kerja.

Di Kabupaten Malang itu sendiri belum ada kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Saat ini menggunakan sistem konsinyasi yang artinya produk yang sudah siap dipasarkan dititipkan kepada agen kemudian dibayar. Namun dengan adanya sistem konsinyasi ini yang ditakutkan adalah saat pengusaha menitipkan hasil produksinya itu langsung dibayar apa tidak, jika saja tidak langsung dibayar inilah yang menjadi kendala dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal inilah yang menjadi tugas penting dari pemerintah untuk selalu memberikan pembinaan secara terintegrasi, serta adanya pendampingan secara terus-menerus.

Untuk membantu dalam pemasaran hasil UMKM yang ada, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMK yang ada. Selain itu juga memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk memfasilitasi para pengusaha UMKM

yang ada di Kabupaten Malang untuk memasarkan hasil produksinya. Namun semua itu tidak hanya dengan mengandalkan Dinas saja, para pengusaha juga harus ikut aktif dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung

1) Bahan baku mudah di dapat

Dalam suatu industri yang bergerak di bidang makanan, bahan baku menjadi faktor utama dalam produksi. Apabila bahan baku yang dibutuhkan sulit untuk didapatkan hal tersebut tentunya dapat menghambat produksi, apalagi pada saat permintaan semakin meningkat.

Seperti pada industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, saat ini dalam memproduksi opak bahan baku yang dibutuhkan mudah untuk didapatkan. Apalagi saat menjelang Hari Raya tiba pesanan menjadi meningkat dan tentunya memerlukan bahan baku yang tidak sedikit. Disini pengusaha opak tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku walaupun dalam jumlah banyak, dan hal inilah yang menjadi pendukung dalam produksi opak.

2) Lokasi yang strategis

Lokasi industri opak yang berada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang merupakan lokasi yang sangat strategis dengan lokasi yang luas dan transportasi mudah di jangkau. Dalam hal ini apabila pemerintah mampu melihat peluang yang ada di Desa Jambangan, maka di desa tersebut mampu untuk dijadikan sebagai sentra industri produksi UKM bukan hanya dari produksi opak saja, melainkan juga produk lain yang telah ada di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Sigit (1987:100) kegiatan pengembangan industri kecil harus didukung oleh pemasaran yang baik diantaranya adalah 4 kegiatan, yaitu produk yang sesuai selera masyarakat, harga yang terjangkau, tempat yang strategis dan promosi yang bagus.

Usaha produksi opak yang ada di Desa Jambangan ini sesuai dengan faktor pendukung dalam mengembangkan industri kecil. Dengan adanya lokasi yang strategis dan produk opak yang sesuai dengan permintaan masyarakat dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu pendukung dalam pemasaran yang baik. Namun dalam hal ini peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dengan melakukan koordinasi yang baik secara terus menerus dengan Dinas terkait.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap usaha termasuk juga industri kecil. Keberhasilan industri kecil

untuk mampu berkembang dan bersaing dengan produk-produk lain sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Selama ini yang menjadi kendala utama dalam mengembangkan suatu usaha terletak pada SDM yang ada, dimana apabila para pelaku-pelaku dalam industri tersebut mempunyai ketrampilan/keahlian dapat membantu dalam mengembangkan industri kecil.

Permasalahan yang saat ini dihadapi pada industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang adalah rendahnya kualitas SDM. Dimana SDM yang ada untuk yang usia tua susah untuk diarahkan dan kadang-kadang kurang bisa menjaga kualitas hasil produksi. Selain itu para pegawai pada industri opak juga kurang disiplin dalam bekerja, dalam satu hari belum tentu semua pegawai bisa masuk bekerja. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya suatu industri kecil, karena terkendala oleh kualitas SDM yang masih rendah.

2) Kurangnya modal usaha

Modal merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya suatu usaha. Dengan tersedianya modal yang cukup dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya juga menentukan maju tidaknya suatu usaha. Untuk saat ini pengusaha opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten

Malang apabila kekurangan modal yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman kepada Bank.

Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan modal, strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dengan memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan tambahan dana dengan akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), selain itu juga memfasilitasi melalui Bank yaitu pada program KUR, dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM.

Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha industri khususnya industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu untuk memperoleh tambahan dana guna kelancaran usahanya.

3) Pemasaran hasil produksi

Selama ini kendala utama yang dihadapi oleh para pengusaha yang bergerak di bidang usaha kecil menengah adalah cara memasarkan barang yang sudah diproduksi. Menurut BPS (2003) mengidentifikasi delapan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil di Indonesia, diantaranya yaitu: kurang permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha, kesulitan bahan baku, kurangnya kemampuan teknis produksi dan keahlian, kurangnya ketrampilan manajerial, kurangnya manajemen

keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan/perundangan).

Kebanyakan dari mereka para pengusaha industri kecil tidak memiliki kemampuan terhadap pecarian pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Arafat (2005) kelemahan dari sisi eksternal tersebut antara lain kelemahan memperoleh peluang pasar dan mendapat bagian dari pasar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan industri kecil yang mengakibatkan produksi yang dihasilkan menjadi kurang berkembang. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah seperti yang dikatakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004:40) dalam upaya pemberdayaan pemerintah harus menyediakan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat. Sehingga dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat membantu dalam pemasaran produksi UMKM yang ada di Kabupaten Malang khususnya pada industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit. Dan untuk saat ini pemerintah Kabupaten Malang dalam memasarkan hasil produksi UMKM telah bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi dalam pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

- a. Melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian diharapkan mampu menumbuhkan iklim usaha bagi Industri Kecil Menengah (IKM) khususnya pada industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selama ini dari Dinas terkait telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) seperti untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan terlebih dahulu harus membuat surat keterangan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat kemudian diserahkan kepada Dinas terkait. Selain itu Dinas juga memfasilitasi dengan sosialisasi kepada UMKM tentang perijinan dasar seperti PIRT dan SIUP itu harus kemana. Dan untuk yang belum mempunyai surat ijin usaha akan difasilitasi untuk mengurus surat ijin usaha. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dalam menumbuhkan iklim usaha, tetapi dalam hal ini pilihan diarahkan kepada masyarakat yang menjalankan untuk bisa mengembangkan usahanya apa hanya diam ditempat. Karena dalam menumbuhkan iklim usaha tidak hanya tergantung dari Dinas saja, masyarakat juga harus aktif dan mau kenal dengan Dinas terkait.

- b. Dalam mengembangkan usaha industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, pengusaha opak telah melakukan berbagai macam inovasi dengan membuat berbagai macam bentuk opak dan menciptakan berbagai macam rasa. Disisi lain dalam mengembangkan usahanya para pengusaha juga mengalami hambatan yang terjadi seperti kekurangan modal, tenaga kerja yang ahli dan terampil, pemasaran hasil produksi, dan sebagainya. Namun semua itu bisa diatasi dengan melakukan diklat dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru, memberikan sosialisasi, memfasilitasi pembuatan jaringan kerjasama dengan retail pasar modern, dan untuk memasarkan hasil produksi UMKM Kabupaten Malang bekerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Dalam mengembangkan usaha para pengusaha khususnya pengusaha opak yang ada di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang juga harus ikut berperan aktif dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dinas terkait apa yang dibutuhkan oleh pengusaha opak untuk mengembangkan usahanya.
- c. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kredit mikro tanpa agunan melalui Bank-Bank pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu mengatasi persoalan modal bagi UMKM. Dan untuk di Kabupaten Malang sendiri cara yang dilakukan Dinas untuk memfasilitasi akses permodalan yaitu terdapat Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD), selain itu juga memfasilitasi melalui Bank yaitu pada program KUR, dan ada juga Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan para pengusaha industri khususnya industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dapat memanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu untuk memperoleh tambahan dana guna kelancaran usahanya.

d. Di Kabupaten Malang belum ada kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Saat ini menggunakan sistem konsinyasi yang artinya produk yang sudah siap dipasarkan dititipkan kepada agen kemudian dibayar. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memfasilitasi para pengusaha dalam promosi produk-produk UMK yang ada. Selain itu juga memfasilitasi pembuatan jaringan kerja sama dengan Gudang Oleh-oleh dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.

2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang meliputi:

a. Faktor pendukung dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan adalah dengan mudahnya mendapatkan bahan baku yang di butuhkan. Selain itu juga mempunyai lokasi yang strategis, dan

pada desa itu sendiri mempunyai lokasi yang sangat luas dan cocok untuk dijadikan sebagai sentra industri UMKM.

- b. Faktor penghambat dalam strategi pemberdayaan UMKM Produksi Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang secara internal adalah masih rendahnya kualitas SDM yang ada, dan kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh pengusaha opak. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah kesulitan dalam pemasaran hasil produksi.

B. Saran

1. Perlu adanya pendampingan secara terus menerus dalam memfasilitasi UMKM yang belum mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).
2. Perlu adanya kerja sama antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar (Kemitraan) dalam memasarkan hasil produksi UMKM di Kabupaten Malang.
3. Sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadikan Desa Jambangan sebagai sentra industri makanan. Karena di Desa tersebut terdapat banyak industri makanan bukan hanya dari produksi opak melainkan produksi makanan lain seperti berbagai macam keripik.
4. Perlu adanya pendampingan secara terus menerus dalam pengajuan proposal untuk UMKM yang ingin mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada.

5. Perlunya melibatkan stakeholder lainnya dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Malang.



DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Wilson. 2005. Quo Vadis Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Indonesia. *Usahawan*. No. 02. Th. XXXIV. Pebruari. Hal: n7-t3.
- Bashith, Abdul. 2001. *Ekonomi Kerakyatan*. Malang: UIN-Maliki Press
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi penelitian sosial (Format-format kuantitatif dan kualitatif)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chambers, Robert. 1993. *Two Cultures of Out Sider*. Bab II Dalam *RuralDevelopment Putting The Last First*; London: Longman Pp 28-46.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Haryadi, D. et all. 1998. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan Peta Potensi Pertumbuhan*. Bandung, Akatiga.
- Herawati, I. 2002 a. Potret Usaha Tenun Tradisional Pedan. *Patra-Widya* Vol.3 No. 1, Maret. Yogyakarta; Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Irianto, Yusuf. 1996. *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembang*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Jensen P. Prof. Dr. 1970. *Teknik-teknik Pengembangan Masyarakat*. Institut Pembangunan Masyarakat. Jl. Seruni 6 Malang.
- Kaloh J. 2007. *Mencari Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan: Teori Kebijaksanaan, dan Penerapan*. Jakarta: CIDESS.
- Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan
- Kuncoro. Mudrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Korten, D.C dan Sjahrir (ed). 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Indonesia. Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2001. Bahan Kuliah; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prayitno, Hadi & Budi Santosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1981.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

- Rahardja, Dawam. 1996. *Program-program Aksi untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kesenjangan* pada PJP II dalam Awan Setya Dewanta (eds.), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Raharjana, T.D. 2003. Siasat usaha Kaum Santri: Ekonomi Moral dan Rasional Dalam Usaha Konfeksi di Mlangi, Yogyakarta. Dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Penyunting Heddy Shri Ahimsa Putra. Yogyakarta: Kepel Press.
- Raharjo, Dawam. 1976. Peranan Industri Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi. *Prisma* 5 (12); Jakarta: LP3ES
- Saleh, I. A. 1986. *Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, Jakarta: LP3ES.
- Sarmini. 2003. Politik Usaha Pengusaha Islam: Kiat Manipulative Dalam Industri Penyamakan Kulit di Magetan, Jawa Timur. Dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Penyunting Heddy Shri Ahimsa putra Yogyakarta Kepel Press.
- Scarborough, Norman M. Dan Thomas Zimmereier. 2000. *Effective Small Business Management: an Entrepreneurial Approach*. New Jersey: Prentice Hall.
- Soekamto, Hadi dkk. 2004. *Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4 (2): 78-79
www.publik.brawijaya.ac.id:Agustus,27,2006
- Sigit, Soehadi. 1987. *Pengantar Ekonomi Perusahaan Praktis*. Yogyakarta: ARMURRITA.
- Sugiyono. 2013. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Difabeta.
- Suharto. Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sumardi. 2000. Peranan Industri Keramik Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. *Putra-Widya* Vol. 1. No. 3. September; Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sumintarsih. 2003. Siasat Resiprositas dan Usaha Kerajinan Agel di Kulon Progo. Dalam *Ekonomi Moral Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa*. Penyunting Heddy Shri Ahimsa Putra. Yogyakarta: Kepel Press.
- Suseno H.G.T.W. 2005. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Posisi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Perekonomian Nasional, Reposisi Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tambunan, Tulus. 1990. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta. Salemba.
- _____. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. Grasindo.
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung. Mandar Maju.

Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Dinkop.malangkab.go.id. *Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Malang*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015

<http://www.jatimprov.go.id/site/jatim-terapkan-lima-strategi-tanggulangi-kemiskinan/> Diakses 23 Februari 2015

<https://harrisfadillah.wordpress.com/2012/04/17/pengembangan-usaha>. Diakses tanggal 19 November 2015

<https://peluang-sukses-usaha-blogspot.co.id/2015/01/cara-mengatasi-kekurangan-modal-usaha>. Diakses pada 19 November 2015

www.malangkab.go.id. *Profil Kabupaten Malang*. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.





LAMPIRAN





Tempat pembuatan Opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang



Berbagai macam bentuk opak yang sudah di kemas



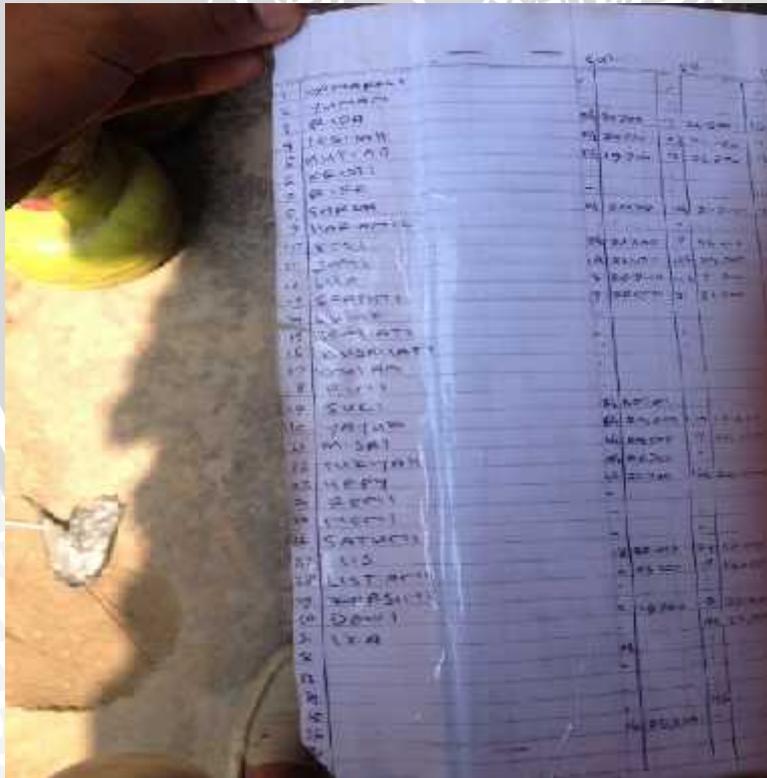
Contoh label yang ada dalam kardus kemasan



Foto (sebelah kiri) saat melakukan wawancara dengan pegawai industri opak, dan foto (sebelah kanan) saat wawancara dengan pengusaha opak



Foto di tempat produksi opak saat setelah melakukan wawancara



Daftar nama pegawai industri opak di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 11599 /UN10.3/AK/2015

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
Jl. KH Agus Salim No.7 Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Uun Meisa Bekti
Alamat : Jl. Demang Jaya 1 No.27 Kreet Senggrong Bululawang Malang
NIM : 115030101111076
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 24 Agustus 2015

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lesty Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 534 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang No. 11549/UN10.3/AK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Riset/Survey

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Riset/Survey** oleh :

Nama / Instansi : Uun Meisa Bekti / Mhs. Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM)

Daerah/tempat kegiatan : Desa Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 27 Agustus 2015

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG**

Biologi HAM dan MASBANG
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

BUDIANTO HERMAWAN SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Malang
3. Sdr. Camat Dampit Kab. Malang
4. Sdr. Kepala Desa Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang
5. Sdr. Mhs. Ybs
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jln. Trunojoyo Kav. 1 Telepon (0341) 393921 Fax. (0341) 393922
Email : dinkopdanumkm@yahoo.co.id
KEPANJEN – MALANG – 65163

Malang, 4 September 2015

Nomor : 518.4/881/421.112/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : SURAT KETERANGAN

kepada :
Yth. Sdr. Uun Meisa Bekti/
Mhs Fak Ilmu Administrasi
Univ. Brawijaya Malang
di -

MALANG

Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang tanggal : 27 Agustus 2015, nomor : 072/534/421.205/2015, perihal : Surat Keterangan untuk melakukan Survey dengan Tema : Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang selama 2 (dua) bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka menerangkan bahwa Sdr. Uun Meisa Bekti (Mhs. Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang), untuk melaksanakan kegiatan survey dimaksud dan agar bisa memberikan manfa'at kepada UMKM khususnya di Wilayah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.

Sesuai prosedur, setelah melaksanakan kegiatan survey dimaksud agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MALANG



SUKOWYONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600920 198803 1 009

CURICULUM VITAE

Nama : Uun Meisa Bekti

Nomor Induk Mahasiswa : 115030101111076

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 10 Mei 1993

Email : Memeiiqbal@yahoo.co.id

No. HP : 081333034869

Pendidikan Formal : 1. SDN Senggrong II (1999-2005)
2. SMP Negeri 1 Bululawang (2005-2008)
3. SMA Negeri 1 Gondanglegi (2008-2011)
4. Universitas Brawijaya (2011-2016)

Pendidikan Non Formal : 1. Magang di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)
Kabupaten Malang

Pengalaman Organisasi : -

